



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021 – 2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

Nomor : B- 19 /BNPB/SPB/PK.01.01/03/2021 19 April 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 berkas
Hal : Pengumuman Peserta Ideathon yang Lolos Tahap Presentasi

Yth. Bapak/Ibu
Sebagaimana Terlampir

Dengan telah diselesaikannya tahap penilaian proposal kegiatan Ideathon Bali Kembali oleh reviewer pada tanggal 01-15 April 2021, bersama ini kami sampaikan nama-nama proposal yang lolos untuk dapat mengikuti tahap presentasi pada tanggal 21 April 2021 secara daring melalui zoom (Meeting ID: 830 1640 2442 dan Passcode: 123123).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak/Ibu peserta yang lolos dapat mempersiapkan bahan presentasi proposalnya masing-masing. Waktu presentasi adalah 20 menit (10 menit sesi presentasi dan 10 menit sesi tanya jawab) sesuai jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, informasi lebih lanjut dapat mengakses laman <https://ideathonbali.bnpb.go.id>. Atas kesediaan, dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Sistem Penanggulangan Bencana

Udrekh

Tembusan:
Plt. Deputi Bidang Sistem dan Strategi.

Lampiran Surat

Nomor : B- 19 /BNPB/SPB/PK.01.01/04/2021

Tanggal : 19 April 2021

Daftar Peserta yang Lolos Tahap Presentasi dan Jadwal:

No	Tema	Judul Proposal	Nama Pengusul	Hari	Jam	Kelas
1	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan E Marketing berdasarkan Model Brand Loyalty Wisatawan pada Industri Pariwisata Bali pada Era New Normal (EMBRONOM)	Dr. I Made Bayu Wisnawa,A.Par.,M.M.,M.Par	Rabu, 21 April 2021	09.00-09.20	A
2	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Policy Framework Pengembangan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital ("DEWATA")	Dr. Putu Yudy Wijaya, SE., M.Si.	Rabu, 21 April 2021	09.00-09.20	B
3	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	DESAIN DIGITAL COMPLEMENTARY MARKETING PADA PEMBERDAYAAN SOCIAL ENTREPRENEURS BERBASIS KEARIFAN LOKAL BALI (DICOATING SEKALI)	Ni Putu Sri Harta Mimba	Rabu, 21 April 2021	09.00-09.20	C
4	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Model Business Continuity Plan (BCP) berbasis Framework of Actions dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 dan New Normal Era (Studi pada UKM Ekspor di Bali)	I Wayan Edi Arsawan	Rabu, 21 April 2021	09.20-09.40	A
5	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	MODEL SMART VILLAGE DESA WISATA MUNDUK MELALUI PENDEKATAN ERGO-INFOCOM UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 - MODESTA MUNDUK	Prof. Dr. Ir. lilik Sudiajeng, M.Erg.	Rabu, 21 April 2021	09.20-09.40	B
6	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Strategi Implementasi Tour Packages Berbasis Local Wisdom Dengan Pendekatan Eco-Tourism Sebagai Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata di Bali	Sucihatningsih Dian Wisika Prajanti	Rabu, 21 April 2021	09.20-09.40	C
7	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	PEMBERDAYAAN & PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI SUBAK UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN PARIWISATA BALI	Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P.	Rabu, 21 April 2021	09.40-10.00	A
8	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Forest Based Tourism Desa Wanagiri untuk Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata -WanaKreatif	Putu Indah Rahmawati	Rabu, 21 April 2021	09.40-10.00	B
9	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	KEBERLANJUTAN DAN KETAHANAN UMKM KERAJINAN KAYU SEBAGAI PENUNJANG PARIWISATA BALI (UMKM KUAT)	Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, SE, MS	Rabu, 21 April 2021	09.40-10.00	C
10	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Otomatisasi Penyortiran dan Pemasaran Buah dengan Teknologi Computer Vision dan Internet of Things (OTONYOMAN)	I Ketut Swardika	Rabu, 21 April 2021	10.00-10.20	A

No	Tema	Judul Proposal	Nama Pengusul	Hari	Jam	Kelas
11	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	PEMETAAN POTENSI DESA CATUR SEBAGAI DESA WISATA HERBAL DI KABUPATEN BANGLI, BALI	I Gusti Bagus Rai Utama	Rabu, 21 April 2021	10.00-10.20	B
12	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	PENGEMBANGAN MODEL DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BISNIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR KULINER DI BALI PADA ERA DAN PASCA PANDEMI COVID-19	Dr. I Gusti Ayu Ketut Giantari, SE, MSi	Rabu, 21 April 2021	10.00-10.20	C
13	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Peta KEDAS (Kelola Dari Sumber) Sampah: Normal Baru Pengelolaan Sampah di Sumber Pasca Pandemi COVID-19 Berbasis Integrasi Peta Dinamis Digital	I Gede Hendrawan	Rabu, 21 April 2021	10.20-10.40	A
14	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	SINERGI PENTAHELIX MENUJU AKSELERASI DESTINASI MICE (MEETINGS, INCENTIVE, CONFERENCE, EXHIBITION) DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA INKLUSIF SEBAGAI MODEL KEBIJAKAN STRATEGI RESILIENSI GREEN ECONOMIC RECOVERY DI PROVINSI BALI	Ni Ketut Sari Adnyani	Rabu, 21 April 2021	10.20-10.40	B
15	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Bali Reborn (Bali Based on Reconstruction of Collaborative Governance): Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Museum Seni di Desa Ubud)	Putu Nomy Yasintha	Rabu, 21 April 2021	10.20-10.40	C
16	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Berlandaskan Kearifan Lokal Tri Hita Karana dengan SWOT Hybrid dan Forward Chaining untuk Membantu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata di Bali	Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom.,M.Kom	Rabu, 21 April 2021	10.40-11.00	A
17	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	PENINGKATAN KUALITAS AIR IRIKASI DENGAN SISTEM CANDUNG DAN TUMBUHAN AIR (SICANTUM) DI KAWASAN AGROWISATA SUBAK LEPUD DALAM Mendukung ATRAKSI WISATA EDUKASI DAN PENGHASIL PANGAN SEHAT	Dr.Ir.I Ketut Sumantra, MP	Rabu, 21 April 2021	10.40-11.00	B
18	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	“FOREST BATHING” A NEW BALINESE ROOTS OF THE LATEST WELLNESS THERAPY AND DISASTER RISK REDUCTION EFFORT IN MOUNT BATUR GEOPARK, BANGLI REGENCY	Eli Jamilah Mihardja	Rabu, 21 April 2021	10.40-11.00	C
19	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	SCALING UP USAHA RAKYAT SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN UMKM SELAMA DAN PASCA PANDEMI (SURYA	I Dewa Gede Rat Dwiyana Putra	Rabu, 21 April 2021	11.00-11.20	A

No	Tema	Judul Proposal	Nama Pengusul	Hari	Jam	Kelas
20	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Penentu Ketahanan Dan Keberlanjutan Bisnis Homestay Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid 19 di Penerapan Zona Hijau Covid Wilayah Sanur Kota Denpasar “Tahan Laju Covid di Zona Hijau”	I Made Adi Suwandana	Rabu, 21 April 2021	11.00-11.20	B
21	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Strategi Digitalisasi Konsinyasi, Waralaba, dan Jejaring Kemitraan Melalui Implementasi e-KOlab (Elektronik Konsinyasi, Waralaba, dan Jejaring Organisasi) (Studi pada UKM Scale Up Binaan Ikatan Wanita Pengusaha Provinsi Bali)	DR. Farida, SE, MM	Rabu, 21 April 2021	11.00-11.20	C
22	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	SEKTOR POTENSIAL ALTERNATIF SETELAH PARIWISATA BALI	Dr Ni Putu Wiwin Setyari, SE., M.Si	Rabu, 21 April 2021	11.20-11.40	A
23	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	DeBUT DIGITALISASI BERKELANJUTAN MENUJU UKM TANGGUH SEBAGAI UPAYA TENUN BALI BERKEMBANG DI ERA NEW NORMAL (Studi Kasus UKM Kain Tenun Astini)	Sri Hartati	Rabu, 21 April 2021	11.20-11.40	B
24	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Shifting Sinergi Desa Wisata Dengan UMKM Mendukung Keberlanjutan Pariwisata Masa Pandemic Di Tabanan (SHISIDEWI IN)	Dr. Ni Luh Putu Agustini K. S.E., M.M.	Rabu, 21 April 2021	11.20-11.40	C
25	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Sistem E-Commerce C2C untuk UMKM Kabupaten Bangli (gagapanbali.com)	Ni Wayan Sumartini Saraswati	Rabu, 21 April 2021	11.40-12.00	A
26	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Adaptasi Strategi Bisnis Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Analisis Swot Studi Pada UMKM Tenun Endek Di Provinsi Bali. (Adapstrabis)	Prof. Dr. I Made Wardana SE MP	Rabu, 21 April 2021	11.40-12.00	B
27	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan untuk Kemandirian Ekonomi Perempuan melalui Inovasi Dried Flower di Desa Pengotan, Bangli	Ade Maharini Adiandari	Rabu, 21 April 2021	11.40-12.00	C
28	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	MODEL PENGUATAN SINERGITAS PENTAHALIX DAN PENINGKATAN KAPABILITAS “TRI DAYA” PADA PEREMPUAN PELAKU USAHA TENUN UNTUK MEWUJUDKAN ECOWISATA BERKELANJUTAN DI PROVINSI BALI	I Gusti Ayu Purnamawati	Rabu, 21 April 2021	12.40-13.00	A
29	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	MENTRANSFORMASI BRICOLAGE: OPTIMALISASI KEREKATAN SOSIAL UMKM KERAJINAN TENUN MENUJU KEBERTAHANAN BISNIS PASCA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BALI	Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi	Rabu, 21 April 2021	12.40-13.00	B
30	Kebijakan publik	Dekonstruksi Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Covid-19	Gede Suardana	Rabu, 21 April 2021	12.40-13.00	C

No	Tema	Judul Proposal	Nama Pengusul	Hari	Jam	Kelas
31	Kebijakan publik	Kebijakan Terkait Program Soft Loan sebagai Stimulus Pemulihan Ekonomi pada Biro Perjalanan Wisata di Bali	Ni Putu Suci Meinarni	Rabu, 21 April 2021	13.00-13.20	A
32	Kebijakan publik	RENCANA STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP SEKTOR PARIWISATA ERA COVID-19 KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI	Ni Wayan Supriyayani,S.Sos.,M.AP	Rabu, 21 April 2021	13.00-13.20	B
33	Kesehatan	Pengembangan Sistem Kontrol Robot Pelayanan Pasien Covid-19	Wayan Gede Suka Parwita	Rabu, 21 April 2021	13.00-13.20	C
34	Kesehatan	FROM GARBAGE TO ADVANTAGE: ALAT PENGOLAH SAMPAH MEDIS COVID-19 (GATE GREEN)	Nita Citrasari	Rabu, 21 April 2021	13.20-13.40	A
35	Kesehatan	SISTEM PSIKOEDUKASI KONSELING ONLINE UNTUK MENANGANI GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL MASYARAKAT BALI DALAM UPAYA TRANFORMASI SOSIAL PASCA PANDEMIC COVID-19 (Akronim SI-Konseling Untuk Bali Bangkit Kembali)	Dr. Kadek Suranata,M.Pd.,Kons	Rabu, 21 April 2021	13.20-13.40	B
36	Kesehatan	BALI KEMBALI COVID19 TRACER: APLIKASI PELACAKAN PENYEBARAN COVID19 DI BALI BERBASIS WEB UNTUK MENDUKUNG 3T	I Putu Agus Eka Pratama, S.T., M.T.	Rabu, 21 April 2021	13.20-13.40	C
37	Kesehatan	PESARUMANA PRESADA	NI KOMANG SUKRAANDINI	Rabu, 21 April 2021	13.40-14.00	A
38	Kesehatan	MAKAR æMaterial Anti Bakar Berbasis Limbah Masker Udaraæ	Dr. Handika Dany Rahmayanti, M.Si	Rabu, 21 April 2021	13.40-14.00	B
39	Kesehatan	Inovasi Pendukung 3T (testing, tracing, treatment) pada Midwifery Care berbasis web di Desa Sanur Wilayah Kerja Puskesmas II Denpasar Selatan	Putu Ayu Ratna Darmayanti	Rabu, 21 April 2021	13.40-14.00	C
40	Kesehatan	COVID CONCRETE (COVCRETE) 19: DAUR ULANG SAMPAH MASKER MEDIS MENJADI BAHAN CAMPURAN PEMBUATAN BETON SERAT DAN PAVING BLOCK	Dr. I Made Wahyu Wijaya, ST	Rabu, 21 April 2021	14.00-14.20	A
41	Kesehatan	GRAND DESAIN KESEHATAN MENTAL KELUARGA PEKERJA PARIWISATA MEWUJUDKAN SAPTA PESONA BALI MASA PANDEMI COVID 19 (INTERKONEKSI PENTAHHELIX DAN CHSE)	sugeng mashudi	Rabu, 21 April 2021	14.00-14.20	B
42	Kesehatan	Pengembangan Hipnoterapi Spiritual Bali (PITU BALI) sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Kesehatan Pariwisata Berbasis Budaya Bali	I Gusti Ngurah Agung Suryaputra	Rabu, 21 April 2021	14.00-14.20	C
43	Kesehatan	Manajemen Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Berbasis Kesehatan Komunitas dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kenderan, Kabupaten Gianyar	I Ketut Swarjana	Rabu, 21 April 2021	14.20-14.40	A

No	Tema	Judul Proposal	Nama Pengusul	Hari	Jam	Kelas
44	Kesehatan	Pengembangan e-Healthy Tourism berbasis SIMEKAR - Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Pariwisata	Dr. dr. Ni Luh Kadek Alit Arsani, S.Ked., M.Biomed.	Rabu, 21 April 2021	14.20-14.40	B
45	Kesehatan	PEMBERIAN BUKU DAN NUTRISI IMUNITAS ALAMIAH (BUNIA) UNTUK MENINGKATKAN KEKEBALAN TUBUH MASYARAKAT TIGA GENERASI DI DESA KERAMBITAN	Dr dr Made Kurnia Widiastuti Giri MKes	Rabu, 21 April 2021	14.20-14.40	C
46	Kesehatan	Implementasi Senam "TAKSI" (Teknik Relaksasi Otot Progresif) Instrumen Musik Bali Dalam Mengatasi Kecemasan Melalui Aplikasi Android Pada Masa Pandemi Covid 19	Desak Made Ari Dwi Jayanti	Rabu, 21 April 2021	14.40.15.00	A
47	Sosial dan Budaya	NILAI KEARIFAN LOKAL TRI HITA KARANA MASYARAKAT BALI AGA UNTUK QUALITY TOURISM DI DESA SIDETAPA	Suswandari	Rabu, 21 April 2021	14.40.15.00	B
48	Sosial dan Budaya	Pemetaan Modal Ketahanan Budaya / Resiliensi Penari Bali Terhadap Paparan Covid-19 (RESICO PENARI)	Nurida Finahari	Rabu, 21 April 2021	14.40.15.00	C
49	Sosial dan Budaya	“Habis Bencana Terbitlah Kebersamaan: Revitalisasi Seni dan Humor Bali menuju Penguatan Modal Sosial Resiliensi Masyarakat dalam Pengentasan Stigma Penderita COVID-19” Akronim: HANABIMA	Dr. Moses Glorno Rumambo Pandin, M.Si., M.Phil., M.Psi., Psi.	Rabu, 21 April 2021	15.00-15.20	A
50	Sosial dan Budaya	Efektivitas Pemberian Edukasi Terstruktur Terhadap Self-Awareness Sebagai Upaya Menciptakan SUKA SUKA COVID-19 (Satu Keluarga Satu Kader COVID-19)	I Nyoman Asdiwinata	Rabu, 21 April 2021	15.00-15.20	B
51	Sosial dan Budaya	STUDI KERENTANAN SOSIAL TERHADAP BERITA HOAKS PADA MASA PANDEMI COVID-19	Putu Indra Christiawan	Rabu, 21 April 2021	15.00-15.20	C
52	Sosial dan Budaya	Strategi Kebijakan Desa Wisata Bangkit Kembali melalui Pengoptimalan Potensi Fisik dan Non Fisik Desa Pasca Covid-19 (DeWi BaLi) Studi Kasus: Desa Wisata Penglipuran, Bangli	Dr. Ir. I Wayan Parwata, M.T	Rabu, 21 April 2021	15.20-15.40	A
53	Sosial dan Budaya	Si Gadis Dewi Sita: Promosi Tiga Dimensi Desa Wisata Sidetapa	Ida Ayu Laksmita Sari	Rabu, 21 April 2021	15.20-15.40	B
54	Sosial dan Budaya	Pemetaan potensi dan Rancangan Village Tourism Activity, sebagai bentuk resiliensi pariwisata Bali melalui website, aplikasi dan sosial media (VIA Bali-resilience program) Studi Kasus: Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, Badung	Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka, M.Si	Rabu, 21 April 2021	15.20-15.40	C
55	Sosial dan Budaya	KKBIC: KONSTRUKSI GERAKAN KOMUNITAS BERBASIS INDIGENOUS CULTURE DALAM MEWUJUDKAN DAYA SAING PARIWISATA BERKELANJUTAN (Studi Komparasi Bali dan Wina)	Dr. Henni Gusfa, M. Si	Rabu, 21 April 2021	15.40-16.00	A

No	Tema	Judul Proposal	Nama Pengusul	Hari	Jam	Kelas
56	Sosial dan Budaya	I BELOG SEBAGAI BASIS PENGUATAN DESA WISATA YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT LOKAL	Dr. I Gede Sudirtha, M.Pd	Rabu, 21 April 2021	15.40-16.00	B
57	Sosial dan Budaya	Bali Becik Luh, Bersama Cermati dan Kenali Hoaks, Bali Terlindungi dan Tangguh	nm ras amanda g	Rabu, 21 April 2021	15.40-16.00	C
58	Sosial dan Budaya	Pemetaan Kapasitas Daya Dukung Objek Wisata Tanah Lot Dalam Penerapan Konsep New Normal (PEKAWISATA)	Yohanes Parlindungan Situmeang	Rabu, 21 April 2021	16.00-16.20	A
59	Teknologi Informasi dan komunikasi	Pengembangan Desa Wisata Digital Terintegrasi Berbasis Sistem Informasi Geografis dan Aplikasi Desa Wisata (SIGADis) di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	I GD Yudha Partama	Rabu, 21 April 2021	16.00-16.20	B
60	Teknologi Informasi dan komunikasi	IMPLEMENTASI SISTEM TRACING DAN TRACKING MOBILITAS PUBLIK BERBASIS QR CODE DAN BIG DATA UNTUK MENDUKUNG PEMBUKAAN INDUSTRI PARIWISATA DI BALI : STUDI KASUS KOTA DENPASAR	Evi Triandini	Rabu, 21 April 2021	16.00-16.20	C
61	Teknologi Informasi dan komunikasi	Pengembangan Big Data pada UMKM dan Pekerja Terdampak COVID-19 untuk Ketepatan Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Kota Denpasar)	Agus Setiawan	Rabu, 21 April 2021	16.20-16.40	A
62	Teknologi Informasi dan komunikasi	Bali Backpacker sebagai Platform Panduan Lengkap Berwisata ke Bali dengan Dwibahasa (Indonesia dan Inggris) untuk Pemulihan Pariwisata Bali pada Masa New Normal Covid-19	Dr. I Gede Susrama Mas Diyasa, ST. MT. IPU	Rabu, 21 April 2021	16.20-16.40	B
63	Teknologi Informasi dan komunikasi	Kajian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, IoT dan Big Data untuk Mendukung Bali Kembali Bertani Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan (NEOBIGTANI)	Ida Bagus Irawan Purnama	Rabu, 21 April 2021	16.20-16.40	C
64	Teknologi Informasi dan komunikasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pelayanan Kegawatdaruratan di Kabupaten Jembrana	I Putu Agus Swastika, M.Kom.	Rabu, 21 April 2021	16.40-17.00	A
65	Teknologi Informasi dan komunikasi	MODEL DIGITALISASI EKOWISATA DI MASA PANDEMI COVID-19	I Gede Sujana Eka Putra, S.T, M.T	Rabu, 21 April 2021	16.40-17.00	B
66	Teknologi Informasi dan komunikasi	IKETAN - Inovasi Komunikasi Efektif Evakuasi untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan turis terhadap Tsunami di Kawasan pariwisata desa TANjung benoa bali	Endra Gunawan	Rabu, 21 April 2021	16.40-17.00	C
67	Teknologi Informasi dan komunikasi	PARIWISATA BUDAYA DENGAN KONSEP TRI HITA KARANA UNTUK DESA DI BALI (PARAHITA BALI) BERBASIS VIRTUAL TOUR (STUDI KASUS : DESA GUNUNG KANGIN, TABANAN-BALI)	Agus Aan Jiwa Permana, S.Kom., M.Cs	Rabu, 21 April 2021	17.00-17.20	A

No	Tema	Judul Proposal	Nama Pengusul	Hari	Jam	Kelas
68	Teknologi Informasi dan komunikasi	SAPA Bali: Sistem Identifikasi Sentimen Pariwisata Bali Berbasis Deep Learning	Kadek Yota Ernanda Aryanto	Rabu, 21 April 2021	17.00-17.20	B
69	Teknologi Informasi dan komunikasi	APLIKASI "LOCKER" SEBAGAI PLATFORM PASIEN LONG COVID TRACKER BERBASIS ANALISIS GEOSPASIAL DAN PROFIL GEJALA UNTUK PEMULIHAN PASCA COVID-19 DI BALI	Tresna Maulana Fahrudin	Rabu, 21 April 2021	17.00-17.20	C
70	Teknologi Informasi dan komunikasi	SIGarbage : Implementasi Model Bisnis Perangkat Lunak Sebagai Layanan (SAAS) pada Sistem Informasi Geografis Angkutan Sampah Badan Umum Milik Desa	Komang Kurniawan Widiartha	Rabu, 21 April 2021	17.20-17.40	A

Keterangan: urutan berdasarkan kelompok tema.



Direktur Sistem Penanggulangan Bencana

Udrekh

Lampiran Surat
Nomor : B- 19 /BNPB/SPB/PK.01.01/04/2021
Tanggal : 19 April 2021

Ketentuan Pelaksanaan Presentasi:

1. Penilaian Tahap Presentasi memiliki proporsi penilaian sebesar 30% dan 70% diambil dari penilaian tahap pertama.
2. Kriteria Penilaian Presentasi:
 - a. Relevansi aspek Manajemen Penanggulangan Bencana dalam kegiatan penelitian (15%)
 - b. Kebermanfaatan penelitian untuk Pemerintah dan Pemprov Bali (10%)
 - c. Strategi keberlanjutan hasil penelitian (5%)
3. Presentasi dapat dilakukan oleh ketua tim atau anggota tim.
4. Waktu presentasi setiap tim adalah 20 menit (10 menit sesi presentasi dan 10 menit sesi tanya jawab).
5. Peserta (ketua pengusul dan tim) diharapkan dapat masuk ruang zoom maksimal 10 menit sebelum waktu presentasi.
6. Format nama akun peserta dalam ruang zoom: **Kelas_Nama Perguruan Tinggi Pengusul_Nama Peserta** (Contoh A_UNDIP_Yudhi Widiastomo).
7. Setiap peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan rapih.
8. Pengusul diharapkan dapat mengisi konfirmasi kehadiran melalui link: <http://bit.ly/presentasibalikembali>.



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

Nomor : B/440/E3/RA.00/2021 27 April 2021
Lampiran : 2 Berkas
Hal : (Revisi) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Skema Kajian Kebijakan Strategis

Yth. Ketua LPM/LPPM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (Lampiran I)

Menindaklanjuti Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-25/BNPB/SPB/PK.01.01/03/2021 perihal Pengumuman Proposal yang Lolos dalam Kegiatan Riset Kebencanaan “Ideathon Bali Kembali”, dengan ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) menugaskan Peneliti (Lampiran II) untuk melaksanakan penelitian Skema Kajian Kebijakan Strategis. Berdasarkan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu Ketua LPM/LPPM agar menyampaikan kepada Peneliti beberapa informasi sebagai berikut :

1. Peneliti agar mengunggah proposal penelitian ke Simlitabmas NG 2.0;
2. Waktu unggah proposal oleh peneliti mulai tanggal **27-29 April 2021**, sedangkan waktu “Approval” Proposal oleh ketua LPPM maksimal tanggal **30 April 2021**.

Demikian informasi ini kami sampaikan agar LPM/LPPM dapat membantu memantau proses unggah proposal yang dilakukan oleh Peneliti di masing-masing Perguruan tinggi. Informasi terkait proses kontrak penelitian dapat menghubungi Sdri Anggun Amalia Fibriyanti 0857-8588-7275 atau Fitriana Rahmawati 0838-6598-5956. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Heri Hermansyah
NIP 197601181999031002

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran I

Nomor : B/440/E3/RA.00/2021

Tanggal : 27 April 2021

Hal : (Revisi) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Skema Kajian Kebijakan Strategis

DAFTAR PERGURUAN TINGGI

No	Nama Perguruan Tinggi
1	Institut Teknologi Bandung
2	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali
3	Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Bali
4	Politeknik Negeri Bali
5	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali
6	Universitas Airlangga
7	Universitas Bakrie
8	Universitas Dhyana Pura
9	Universitas Hindu Indonesia
10	Universitas Mahasaraswati Denpasar
11	Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
12	Universitas Ngurah Rai
13	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
14	Universitas Pendidikan Ganesha
15	Universitas Pendidikan Nasional
16	Universitas Persada Indonesia Y.A.I
17	Universitas Triatma Mulya
18	Universitas Udayana
19	Universitas Warmadewa
20	Universitas Widyagama Malang

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran II

Nomor : B/440/E3/RA.00/2021

Tanggal : 27 April 2021

Hal : (Revisi) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Skema Kajian Kebijakan Strategis

DAFTAR PENELITI

NO	INSTITUSI	PENGUSUL	NIDN	JUDUL	TEMA
1	Institut Teknologi Bandung	Endra Gunawan	0019058005	IKETAN - Inovasi Komunikasi Efektif Evakuasi untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan turis terhadap Tsunami di Kawasan pariwisata desa TANjung benoa bali	Teknologi Informasi dan komunikasi
2	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali	Evi Triandini	0822047001	IMPLEMENTASI SISTEM TRACING DAN TRACKING MOBILITAS PUBLIK BERBASIS QR CODE DAN BIG DATA UNTUK MENDUKUNG PEMBUKAAN INDUSTRI PARIWISATA DI BALI : STUDI KASUS KOTA DENPASAR	Teknologi Informasi dan komunikasi
3	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali	Ni Wayan Sumartini Saraswati	0005097904	Pengembangan Sistem E-Commerce C2C untuk UMKM Kabupaten Bangli (gagapanbali.com)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali	Ni Putu Suci Meinarni	0817058501	Kebijakan Terkait Program Soft Loan sebagai Stimulus Pemulihan Ekonomi pada Biro Perjalanan Wisata di Bali	Kebijakan publik
5	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali	Wayan Gede Suka Parwita	0822088901	Pengembangan Sistem Kontrol Robot Pelayanan Pasien Covid-19	Kesehatan
6	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali	I Gede Sujana Eka Putra, S.T, M.T	0816077801	MODEL DIGITALISASI EKOWISATA DI MASA PANDEMI COVID-19	Teknologi Informasi dan komunikasi

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

NO	INSTITUSI	PENGUSUL	NIDN	JUDUL	TEMA
7	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali	Komang Kurniawan Widiartha	0826048702	SIGarbage : Implementasi Model Bisnis Perangkat Lunak Sebagai Layanan (SAAS) pada Sistem Informasi Geografis Angkutan Sampah Badan Umum Milik Desa	Teknologi Informasi dan komunikasi
8	Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Bali	I Ketut Swarjana	0807087401	Manajemen Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Berbasis Kesehatan Komunitas dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kenderan, Kabupaten Gianyar	Kesehatan
9	Politeknik Negeri Bali	I Wayan Edi Arsawan	0001088205	Pengembangan Model Business Continuity Plan (BCP) berbasis Framework of Actions dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 dan New Normal Era (Studi pada UKM Ekspor di Bali)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
10	Politeknik Negeri Bali	Prof. Dr. Ir. lilik Sudiajeng, M.Erg.	0016085814	MODEL SMART VILLAGE DESA WISATA MUNDUK MELALUI PENDEKATAN ERGO-INFOCOM UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 - MODESTA MUNDUK	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
11	Politeknik Negeri Bali	I Ketut Swardika	0002057004	Otomatisasi Penyortiran dan Pemasaran Buah dengan Teknologi Computer Vision dan Internet of Things (OTONYOMAN)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
12	Politeknik Negeri Bali	Ida Bagus Irawan Purnama	0014027605	Kajian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, IoT dan Big Data untuk Mendukung Bali Kembali Bertani Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan (NEOBIGTANI)	Teknologi Informasi dan komunikasi
13	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali	I Nyoman Asdiwinata	0808078804	Efektivitas Pemberian Edukasi Terstruktur Terhadap Self-Awareness Sebagai Upaya Menciptakan SUKA SUKA COVID-19 (Satu Keluarga Satu Kader COVID-19)	Sosial dan Budaya

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

NO	INSTITUSI	PENGUSUL	NIDN	JUDUL	TEMA
14	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali	NI KOMANG SUKRAANDINI	0811048601	PESARUMANA PRESADA	Kesehatan
15	Universitas Airlangga	Nita Citrasari	0002088201	FROM GARBAGE TO ADVANTAGE: ALAT PENGOLAH SAMPAH MEDIS COVID-19 (GATE GREEN)	Kesehatan
16	Universitas Airlangga	Dr. Moses Glorno Rumambo Pandin, M.Si., M.Phil., M.Psi., Psi.	0011117006	“Habis Bencana Terbitlah Kebersamaan: Revitalisasi Seni dan Humor Bali menuju Penguatan Modal Sosial Resiliensi Masyarakat dalam Pengentasan Stigma Penderita COVID-19” Akronim: HANABIMA	Sosial dan Budaya
17	Universitas Bakrie	Eli Jamilah Mihardja	0321107302	"FOREST BATHING“ A NEW BALINESE ROOTS OF THE LATEST WELLNESS THERAPY AND DISASTER RISK REDUCTION EFFORT IN MOUNT BATUR GEOPARK, BANGLI REGENCY	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
18	Universitas Dhyana Pura	I Gusti Bagus Rai Utama	0810107001	PEMETAAN POTENSI DESA CATUR SEBAGAI DESA WISATA HERBAL DI KABUPATEN BANGLI, BALI	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
19	Universitas Hindu Indonesia	Dr. Putu Yudy Wijaya, SE., M.Si.	0830038202	Policy Framework Pengembangan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital ("DEWATA")	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
20	Universitas Hindu Indonesia	Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom.,M.Kom	0825107701	Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Berlandaskan Kearifan Lokal Tri Hita Karana dengan SWOT Hybrid dan Forward Chaining untuk Membantu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata di Bali	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

NO	INSTITUSI	PENGUSUL	NIDN	JUDUL	TEMA
21	Universitas Mahasaraswati Denpasar	Dr.Ir.I Ketut Sumantra, MP	0031126142	PENINGKATAN KUALITAS AIR IRIGASI DENGAN SISTEM CANDUNG DAN TUMBUHAN AIR (SICANTUM) DI KAWASAN AGROWISATA SUBAK LEPUD DALAM MENDUKUNG ATRAKSI WISATA EDUKASI DAN PENGHASIL PANGAN SEHAT	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
22	Universitas Mahasaraswati Denpasar	Dr. I Made Wahyu Wijaya, ST	0816089102	COVID CONCRETE (COVCRETE) 19: DAUR ULANG SAMPAH MASKER MEDIS MENJADI BAHAN CAMPURAN PEMBUATAN BETON SERAT DAN PAVING BLOCK	Kesehatan
23	Universitas Mahasaraswati Denpasar	I GD Yudha Partama	0809038901	Pengembangan Desa Wisata Digital Terintegrasi Berbasis Sistem Informasi Geografis dan Aplikasi Desa Wisata (SIGADis) di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan	Teknologi Informasi dan komunikasi
24	Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA	Suswandari	0020116601	NILAI KEARIFAN LOKAL TRI HITA KARANA MASYARAKAT BALI AGA UNTUK QUALITY TOURISM DI DESA SIDETAPA	Sosial dan Budaya
25	Universitas Ngurah Rai	I Made Adi Suwandana	0815108503	Penentu Ketahanan Dan Keberlanjutan Bisnis Homestay Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid 19 di Penerapan Zona Hijau Covid Wilayah Sanur Kota Denpasar –Tahan Laju Covid di Zona Hijau–	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
26	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Dr. I Gede Susrama Mas Diyasa, ST. MT. IPU	0019067008	Bali Backpacker sebagai Platform Panduan Lengkap Berwisata ke Bali dengan Dwibahasa (Indonesia dan Inggris) untuk Pemulihan Pariwisata Bali pada Masa New Normal Covid-19	Teknologi Informasi dan komunikasi

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

NO	INSTITUSI	PENGUSUL	NIDN	JUDUL	TEMA
27	Universitas Pendidikan Ganesha	Dr. dr. Ni Luh Kadek Alit Arsani, S.Ked., M.Biomed.	0025027505	Pengembangan e-Healthy Tourism berbasis SIMEKAR - Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Pariwisata	Kesehatan
28	Universitas Pendidikan Ganesha	Kadek Yota Ernanda Aryanto	0024037804	SAPA Bali: Sistem Identifikasi Sentimen Pariwisata Bali Berbasis Deep Learning	Teknologi Informasi dan komunikasi
29	Universitas Pendidikan Ganesha	Putu Indah Rahmawati	0012703800	Pengembangan Forest Based Tourism Desa Wanagiri untuk Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata - WanaKreatif	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
30	Universitas Pendidikan Ganesha	I Gusti Ayu Purnamawati	0004117906	MODEL PENGUATAN SINERGITAS PENTAHHELIX DAN PENINGKATAN KAPABILITAS "TRI DAYA" PADA PEREMPUAN PELAKU USAHA TENUN UNTUK MEWUJUDKAN ECOWISATA BERKELANJUTAN DI PROVINSI BALI	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
31	Universitas Pendidikan Ganesha	Dr. Kadek Suranata, M.Pd., Kons	0016088201	SISTEM PSIKOEDUKASI KONSELING ONLINE UNTUK MENANGANI GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL MASYARAKAT BALI DALAM UPAYA TRANSFORMASI SOSIAL PASCA PANDEMIC COVID-19 (Akronim SI-Konseling Untuk Bali Bangkit Kembali)	Kesehatan
32	Universitas Pendidikan Ganesha	I Gusti Ngurah Agung Suryaputra	0017127704	Pengembangan Hipnoterapi Spiritual Bali (PITU BALI) sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Kesehatan Pariwisata Berbasis Budaya Bali	Kesehatan
33	Universitas Pendidikan Nasional	Gede Suardana	0805127901	Dekonstruksi Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Covid-19	Kebijakan publik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

NO	INSTITUSI	PENGUSUL	NIDN	JUDUL	TEMA
34	Universitas Persada Indonesia Y.A.I	DR. Farida, SE, MM	0303127102	Strategi Digitalisasi Konsinyasi, Waralaba, dan Jejaring Kemitraan Melalui Implementasi e-KOLab (Elektronik Konsinyasi, Waralaba, dan Jejaring Organisasi) (Studi pada UKM Scale Up Binaan Ikatan Wanita Pengusaha Provinsi Bali)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
35	Universitas Triatma Mulya	Dr. Ni Luh Putu Agustini K. S.E., M.M.	0803087303	Shifting Sinergi Desa Wisata Dengan UMKM Mendukung Kebertahanan Pariwisata Masa Pandemi Di Tabanan (SHISIDEWI IN)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
36	Universitas Triatma Mulya	Dr. I Made Bayu Wisnawa, A.Par., M.M., M.Par	0006127503	Pengembangan E Marketing berdasarkan Model Brand Loyalty Wisatawan pada Industri Pariwisata Bali pada Era New Normal (EMBRONOM)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
37	Universitas Udayana	Ni Wayan Supriliyani, S.Sos., M.AP	0010048108	RENCANA STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP SEKTOR PARIWISATA ERA COVID-19 KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI	Kebijakan publik
38	Universitas Udayana	Prof. Dr. I Made Wardana SE MP	0001085512	Adaptasi Strategi Bisnis Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Analisis Swot Studi Pada UMKM Tenun Endek Di Provinsi Bali. (Adapstrabis)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
39	Universitas Udayana	Ni Putu Sri Harta Mimba	0015057316	DESAIN DIGITAL COMPLEMENTARY MARKETING PADA PEMBERDAYAAN SOCIAL ENTREPRENEURS BERBASIS KEARIFAN LOKAL BALI (DICOATING SEKALI)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
40	Universitas Udayana	Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P.	0012025808	PEMBERDAYAAN & PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI SUBAK UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN PARIWISATA BALI	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

NO	INSTITUSI	PENGUSUL	NIDN	JUDUL	TEMA
41	Universitas Udayana	I Gede Hendrawan	0024047906	Peta KEDAS (Kelola Dari Sumber) Sampah: Normal Baru Pengelolaan Sampah di Sumber Pasca Pandemi COVID-19 Berbasis Integrasi Peta Dinamis Digital	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
42	Universitas Udayana	Putu Nomy Yasintha	0030048703	Bali Reborn (Bali Based on Reconstruction of Collaborative Governance): Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Museum Seni di Desa Ubud)	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
43	Universitas Udayana	Dr Ni Putu Wiwin Setyari, SE., M.Si	0027127802	SEKTOR POTENSIAL ALTERNATIF SETELAH PARIWISATA BALI	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
44	Universitas Udayana	Dr. I Gusti Ayu Ketut Giantari, SE, MSi	0002106102	PENGEMBANGAN MODEL DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BISNIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR KULINER DI BALI PADA ERA DAN PASCA PANDEMI COVID-19	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
45	Universitas Udayana	I Putu Agus Eka Pratama, S.T., M.T.	0003118509	BALI KEMBALI COVID19 TRACER: APLIKASI PELACAKAN PENYEBARAN COVID19 DI BALI BERBASIS WEB UNTUK MENDUKUNG 3T	Kesehatan
46	universitas Udayana	nm ras amanda g	0313078004	Bali Becik Luh, Bersama Cermati dan Kenali Hoaks, Bali Terlindungi dan Tangguh	Sosial dan Budaya
47	Universitas Warmadewa	Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka, M.Si	0813085701	Pemetaan potensi dan Rancangan Village Tourism Activity, sebagai bentuk resiliensi pariwisata Bali melalui website, aplikasi dan sosial media (VIA Bali-resilience program) Studi Kasus: Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, Badung	Sosial dan Budaya

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

NO	INSTITUSI	PENGUSUL	NIDN	JUDUL	TEMA
48	Universitas Warmadewa	Dr. Ir. I Wayan Parwata, M.T	0813036701	Strategi Kebijakan Desa Wisata Bangkit Kembali melalui Pengoptimalan Potensi Fisik dan Non Fisik Desa Pasca Covid-19 (DeWi BaLi) Studi Kasus: Desa Wisata Penglipuran, Bangli	Sosial dan Budaya
49	Universitas Widyagama Malang	Nurida Finahari	0006127536	Pemetaan Modal Ketahanan Budaya / Resiliensi Penari Bali Terhadap Paparan Covid-19 (RESICO PENARI)	Sosial dan Budaya

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr PUTU YUDY WIJAYA S.E., M.Si

Alamat : Br. Gelulung, Desa Sukawati, Kec. Sukawati, Kab Gianyar, Bali

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 328/E4.1/AK.04.PT/2021 dan Perjanjian / Kontrak

Nomor 250A/KP.I/LPPM/UNHI/VI/2021 mendapatkan Anggaran Penelitian POLICY

FRAMEWORK PENGEMBANGAN DESA WISATA TANGGUH BENCANA BERBASIS

DIGITAL ("DEWATA") sebesar 60,000,000 .

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
01	Bahan ATK.	4,345,000
02	Pengumpulan Data Transport, Uang Harian, Biaya Konsumsi.	27,885,000
03	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan) Ruang Penunjang Penelitian, Honorarium Narasumber, Uang Harian, Transport Lokal, Biaya Konsumsi Rapat.	22,090,000
04	Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan Honorarium Narasumber, Uang Harian, Transport Lokal, Biaya Konsumsi Rapat, Publikasi Artikel di Jurnal Internasional, Biaya Luaran Iptek Lainnya.	5,680,000
	Jumlah	60.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Denpasar, 15 - 11 - 2021

Ketua,

(Dr PUTU YUDY WIJAYA, S.E., M.Si)
NIP/NIK 07.82.1.051

PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN AKHIR PENELITIAN TAHUN TUNGGAL

ID Proposal: 8d92547c-596c-4582-9059-5b02a1603440
Laporan Akhir Penelitian: tahun ke-1 dari 1 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

POLICY FRAMEWORK PENGEMBANGAN DESA WISATA TANGGUH BENCANA BERBASIS DIGITAL (“DEWATA”)

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, Dan Budaya			

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Penugasan	Kajian Kebijakan Strategis	SBK Kajian Aktual Strategis	SBK Kajian Aktual Strategis	4	1

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
PUTU YUDY WIJAYA Ketua Pengusul	Universitas Hindu Indonesia	Manajemen		6158063	2
Dr. NI NYOMAN RENI SUASIH S.IP, M.Si Anggota Pengusul 1	Universitas Udayana	Ekonomi Pembangunan	Mempersiapkan instrumen penelitian; melakukan analisis data; melakukan interpretasi data; menyusun draft luaran artikel ilmiah.	6754269	2
Dr I PUTU SASTRA WIBAWA S.H.,	Universitas Hindu Indonesia	Hukum Agama Hindu	Mempersiapkan pengumpulan data, menyiapkan	6686280	1

M.H Anggota Pengusul 2			draft luaran kebijakan.		
KADEK OKY SANJAYA S.Pd, M.Kom Anggota Pengusul 3	Politeknik Ganesa Guru	Manajemen Informatika	Melakukan pengumpulan data, menyiapkan rancangan digital design; menyiapkan website; menyiapkan diseminasi	6657590	0

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis	Tersedia	

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Artikel di jurnal internasional	Accepted	Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development
1	Artikel pada Conference/Seminar Internasional	Terbit dalam Prosiding	seminar internasional/nasional pada saat peringatan Bulan PRB (sesuai pedoman IDEATHON Bali Kembali)

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 1 Tahun Rp. 60,000,000

Tahun 1 Total Rp. 60,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	4	900,000	3,600,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	10	415,000	4,150,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Uang Harian	OH	20	115,000	2,300,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	30	68,000	2,040,000
Bahan	ATK	Paket	5	869,000	4,345,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	2,500,000	2,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll)	Paket	2	1,250,000	2,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	10	68,000	680,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	60	115,000	6,900,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	70	207,500	14,525,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	95	68,000	6,460,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	4	2,500,000	10,000,000

6. HASIL PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian Bali terkonstraksi sangat dalam karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk bidang pariwisata. Adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali membuat pemerintah maupun pelaku pariwisata mulai melirik pangsa pasar wisatawan domestik. Pemerintah menilai Bali sebagai daerah terbaik dalam penanganan COVID-19, karena peran Desa Adat, sehingga pengembangan wisata dapat sejalan dengan konsep desa tangguh bencana melalui Desa Adat (Mandira dan Yudha, 2021). Selain itu, diperlukan sentuhan inovasi digital dalam pengembangan konsep desa wisata (e-tourism), untuk membuat calon wisatawan tertarik serta menjadi pembeda dengan wisata sejenis lainnya, apalagi desa wisata di Bali yang memanfaatkan digitalisasi masih minim (Nirmala dan Lavianto, 2019). Sehingga tujuan penelitian ini yaitu menyusun policy framework yang holistik untuk pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital (“DEWATA”) menjadi penting.

Perpaduan antara konsep desa wisata, desa tangguh bencana, serta desa digital akan menjadi ideal untuk pemberdayaan masyarakat Bali, khususnya melalui bingkai Desa Adat. Roadmap penelitian ini juga telah disusun secara berkelanjutan sehingga dapat dijadikan role model “DEWATA” lain di Bali. Ketua maupun anggota pengusul telah memiliki rekam jejak dalam melakukan penelitian di bidang desa wisata, IT, pemberdayaan masyarakat, serta analisis kebijakan publik. Selain itu, tim pengusul juga berpengalaman dalam menyusun kajian akademik yang dijadikan dasar penyusunan peraturan daerah di Provinsi Bali, seperti penyusunan naskah akademik Ranperda Provinsi Bali tentang Labda Pacingkremen Desa Adat (Lembaga Perkreditan Desa) dan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (sejenis BUMDes untuk Desa Adat).

Metode penelitian ini menggunakan metode pemberdayaan masyarakat maupun pendekatan analisis kebijakan. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah metode RRA (Rapid Rural Appraisal) maupun PRA (Participatory Rural Appraisal). Analisis kebijakan publik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kebijakan prospektif dengan alat analisis MULTIPOL (multi policy) untuk menghasilkan hierarchy policy. Untuk mendukung metode analisis tersebut, pengumpulan data dilakukan melalui FGD, kuesioner, dan

wawancara.

Luaran penelitian ini adalah naskah akademik berupa model kebijakan, publikasi artikel ilmiah pada jurnal, presentasi pada seminar, publikasi pada media massa (melalui pemberitaan TV dan kanal YouTube), serta website “DEWATA” bagi Desa Adat Tegallingsah. Adapun dampak yang diharapkan meliputi aspek dampak ekonomi, pemberdayaan, sosial, ketertiban, dan Kesehatan.

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

desa wisata; desa tangguh bencana; desa digital; framework desa; strategi pengembangan

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Tahap penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan pada proposal, baik pada tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Sebagaimana telah dipaparkan pada proposal bahwa tujuan utama penelitian ini adalah menyusun *policy framework* yang holistik untuk pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital (“DEWATA”). Data telah dikumpulkan melalui wawancara serta FGD dengan masyarakat setempat (masyarakat Desa Adat Tegallingah), serta melibatkan stakeholders terkait (seperti Pemerintah Desa Bedulu, BPBD Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, dan akademisi pakar IT).

Penelitian ini menggunakan metode pemberdayaan masyarakat maupun pendekatan analisis kebijakan. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*) maupun PRA (*Participatory Rural Appraisal*). RRA awalnya memang ditujukan untuk menganalisis masalah pariwisata di pedesaan, sedangkan PRA merupakan perkembangan dari metode RRA yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat desa [1]. Selanjutnya analisis kebijakan dilakukan dengan teknik analisis prospektif MULTIPOL, yang maksudnya adalah “MULTI-criteria” dan “POLicy” dengan pendekatan *integrated participatory* yang akan menghasilkan *hierarchy policy* [2]. Oleh karena itu, sebelum menyusun *hierarchy policy* melalui analisis MULTIPOL, maka terdapat beberapa kriteria, *policy*, *actions*, serta skenario yang harus ditentukan.

Tabel 1. Policy Pengembangan Desa Adat Sebagai “DEWATA”

No	Policy	Simbol	Deskripsi
1.	Desa Tangguh Bencana	tagana	Desa adat yang tangguh dalam menghadapi bencana akibat pandemi COVID-19
2.	Desa Wisata	dewi	Desa adat yang mengorganisir kegiatan wisata di daerahnya dengan partisipasi masyarakat.
3.	Desa Digital	digides	Desa adat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
4.	Integrasi “DEWATA”	dewata	Bentuk integrasi antara pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital

Tabel 2. Program (Actions) Pengembangan Desa Adat Sebagai “DEWATA”

No	Action	Simbol
1.	Penataan obyek/daya tarik wisata	Tour.obj
2.	Pembangunan dan penguatan infrastruktur pedesaan	Vil.infra
3.	Pengembangan dan peningkatan jaringan informasi	ICT
4.	Penguatan unit usaha masyarakat pedesaan	SMME
5.	Peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata	Tour.skill
6.	Pemberdayaan kelompok masyarakat	Empower
7.	Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana	Mitigation
8.	Peningkatan literasi digital masyarakat	Dig.liter

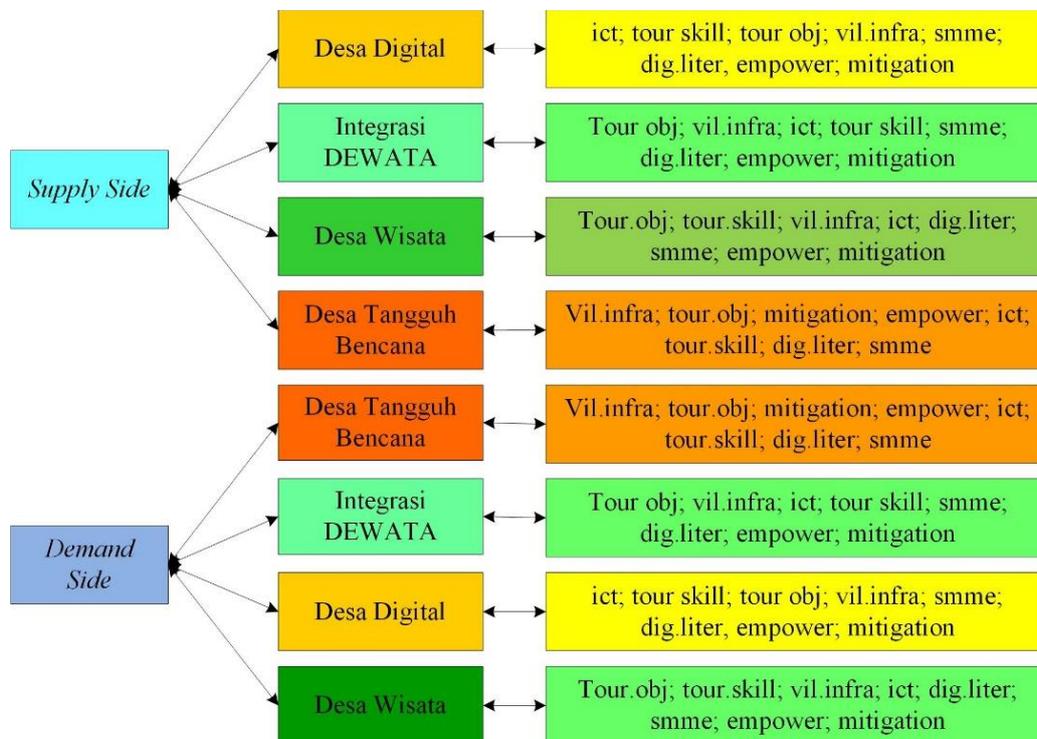
Tabel 3. Kriteria Evaluasi Pengembangan Desa Adat Sebagai “DEWATA”

Tujuan	Kriteria	Bobot	Simbol
Pengembangan ekonomi	1. Peningkatan Pendapatan	6	income
	2. Peningkatan Daya Saing	5	comptv
Kohesi sosial	3. Penyerapan Tenaga Kerja	5	employ
	4. Tumbuhnya Usaha Baru	5	business
Perlindungan lingkungan	5. Kelestarian Lingkungan	5	envirm
Aksesibilitas	6. Peningkatan Infrastruktur	4	infrast
Pelestarian Budaya	7. Adanya Event/Paket Wisata	4	Event

Tabel 4. Skenario Pengembangan Desa Adat Sebagai “DEWATA”

No	Skenario	Simbol	Deskripsi
1.	<i>Supply Side</i>	SS	Skenario pembangunan perdesaan berbasis <i>supply side</i> lebih menekankan investasi pada sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pembentukan modal atau capital formation (Fauzi, 2019).
2.	<i>Demand Side</i>	DS	Skenario pembangunan perdesaan berbasis <i>demand side</i> lebih ditekankan pada injeksi ekonomi berupa dana transfer maupun belanja publik. Dengan kata lain, <i>demand side</i> merupakan pendekatan <i>Keynesian</i> dalam skenario pembangunan perdesaan (Deaton dan Nelson, 1992 dalam Fauzi, 2019).

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disajikan *hierarchy policy* sebagai *policy framework* dalam pengembangan Desa Adat sebagai DEWATA sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Policy Framework Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA”

Mengingat bahwa penelitian ini termasuk dalam skema kajian kebijakan strategis, dimana luaran wajib adalah naskah akademik (*policy brief*, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis) Naskah akademik telah selesai disusun

Sedangkan capaian luaran tambahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Artikel di jurnal internasional, dimana saat ini artikel telah *accepted* pada Jurnal Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development (index WoS/ESCI).
- 2) Mengingat bahwa tidak dilaksanakannya seminar pada saat peringatan Bulan PRB (sebagaimana pedoman IDEATHON Bali Kembali), maka hasil penelitian telah *accepted* untuk didiseminasikan pada Conference/Seminar Nasional, SENASTEK (Seminar Nasional Sains, Teknologi dan Humaniora 2021) yang diselenggarakan pada tanggal : 24-26 November 2021.

Selain itu, beberapa luaran tambahan lain dari hasil penelitian ini yaitu:

- 1) Publikasi pada media massa, yaitu pemberitaan pada stasiun televisi Bali TV. Selain itu, terdapat juga publikasi pada media massa cetak dan *online* Nusa Bali sebagaimana disajikan pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Publikasi pada Media Cetak Nusa Bali (1)

Desa Wisata Mesti Jujur Berpromosi Digital

GIANYAR, NusaBali

Rekayasa kecanggihan teknologi dalam digitalisasi promosi, sangat memungkinkan tampilan objek wisata dalam gawai atau gadget, lebih indah dibandingkan aslinya. Oleh karena itu, promosi berbasis digital mesti tetap menjaga etika berlandaskan kejujuran dan objektif.

Hal itu ditegaskan Dr Ni Nyoman Reni Suasih SIP MSi, peneliti/dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Diseminasi dan Sosialisasi Kebijakan Desa Wisata Digital dan Tangguh Bencana (Dewata) di Desa Adat Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

FGD digelar di Wantilan Pokdarwis Desa Bedulu, Banjar Tegallingah, Sabtu (18/9). Dr Reni menjelaskan, kejujuran adalah modal utama setiap aktivitas, termasuk dalam berpromosi wisata. Dengan kejujuran, maka segala konten yang diunggah baik dalam bentuk web-

site, media sosial dalam pelbagai fitur, akan dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak, terutama wisatawan. "Saya setuju, karena piawai merakayasa teknologi, jangan lantas berpromosi digital jadi *lebay* (berlebihan,Red)," ujar doktor asal Banjar Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar ini.

FGD tersebut melibatkan Kasubid Pencegahan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Bali Chassario Maraden, Sekdis Pariwisata Gianyar Pande Putu Ayu Sri Ratnawati Spt Msi, Perbekel Bedulu I Putu Ariawan, Bendesa Adat Tegallingah I Ketut Reman, Ketua Yayasan Suceu Wisata Tegallingah, merangkap Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bedulu I Putu Umbara, dan perwakilan sekaa teruna-teruni Desa Adat Tegallingah. FGD juga melibatkan tim peneliti dari UNHI dan Universitas Udayana Denpasar, yakni Ketua Tim Dr Putu

Yudy Wijaya SE MSi, Dr Ni Nyoman Reni Suasih SIP MSi, Dr I Putu Sastra Wibawa SH MH, Kadek Oky Sanjaya Spd Mkom, dan I Komang Triyana Mertayasa. Tim ini menggarap riset kebencanaan Ideathon Bali Bangkit Tahun 2021.

Peneliti bidang IT Kadek Oky Sanjaya Spd Mkom mengakui ada beberapa konten promosi wisata via medsos yang cenderung tak sesuai kenyataan. Manurutnya, cara itu kurang elok karena akan bisa berdampak wisatawan kecewa saat melihat objek aslinya di lapangan. Sarannya, promosi antara lain melalui medsos mesti jujur, sehingga apa yang dipromosikan nyata dan sesuai harapan wisatawan. "Konten promosi juga mesti dipertanggungjawabkan. Jangan sembarang edit dan *share*," jelas dosen TIK di UNHI Denpasar, asal Buleleng ini.

Ketua Yayasan Suceu Wisata Putu Umbara mengatakan pengembangan desa wisata membutuhkan SDM handal, terutama dalam era digital ini. Karena

promosi pariwisata ke depan sangat berubah dari manual ke digital. "Kalau kami orangtua masih gapek. Kami hanya buat pondasi desa wisata, silakan anak-anak muda desa garap digitalisasi desa wisata," jelas pemandu wisata asal Banjar Tegallingah, Desa Bedulu ini.

Ketua Tim Peneliti Dr Putu Yudy Wijaya menjelaskan desa disebut desa wisata digital jika desa telah mengelola pariwisatanya berbasis digital. Basis itu baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, promosi, hingga evaluasi menyeluruh. Dia menyarankan agar desa memanfaatkan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk peningkatan pelayanan masyarakat wisata. Karena digitalisasi masih merupakan cara terefektif dan efisien untuk berpromosi secara masif. "Desa mesti melek digital, namun kontennya harus dipertanggungjawabkan," ujarnya. Kegiatan itu diakhiri dengan penyerahan website www.tegallingah.com, dari tim peneliti kepada Desa Adat Tegallingah. © Isa

Gambar 3. Publikasi pada Media Cetak Nusa Bali (2)

- 2) Publikasi video rangkaian kegiatan penelitian masih telah disusun dan saat ini masih dalam tahap editing.
- 3) Website "DEWATA" bagi Desa Adat Tegallingah telah dapat diakses melalui tautan www.tegallingah.com. Website ini masih akan terus disempurnakan sesuai dengan input yang diberikan dari Desa Adat Tegallingah.

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Sebagaimana telah dipaparkan mengenai capaian luaran, maka berikut diuraikan kembali status dari tiap luaran.

Tabel 5. Jenis, Identitas, dan Status Ketercapaian Luaran

No	Jenis Luaran	Status	Keterangan
	Luaran Wajib		
1.	Naskah Akademik (<i>Policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)	Finished	<ul style="list-style-type: none"> Naskah Akademik sudah selesai disusun Naskah Akademik dapat diakses pada tautan https://drive.google.com/file/d/1a_QgowhO5WFAN-oez2RHPcSMmVEZ7kah/view?usp=sharing
	Luaran Tambahan		
2.	Artikel di jurnal internasional	Accepted	<ul style="list-style-type: none"> Jurnal Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development (Index WoS/ESCI) LoA, journal profile, dan artikel dapat diakses pada tautan https://drive.google.com/file/d/1qHVJ7foohPQyK6h-1IV2C1Hwn0qg2t/view?usp=sharing
3.	Artikel diseminarkan pada Conference/Seminar Nasional	Accepted untuk conference	<ul style="list-style-type: none"> Artikel penelitian ini di seminarkan pada Conference/Seminar Nasional, SENASTEK (Seminar Nasional Sains, Teknologi dan Humaniora 2021) yang diselenggarakan pada tanggal : 24-26 November 2021. LoA dan artikel dapat diakses pada tautan https://drive.google.com/file/d/11MPmDwSVkt1IYHdXvTK-6-ttFdUjFcmN/view?usp=sharing

5.	Monograf	Done	<ul style="list-style-type: none"> • Monograf telah selesai disusun dan dapat diakses pada tautan https://drive.google.com/file/d/1CwLqLSvi7a0MI01BKGuHpfqilYA-ajHs/view?usp=sharing • Saat ini masih menunggu ISBN untuk dapat dilanjutkan ke proses cetak.
4.	Publikasi Media Massa - Bali TV - Nusa Bali	Done Done	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diakses pada tautan https://youtu.be/rDWhgY4Gs00 • Versi Cetak telah terbit pada Harian Nusa Bali tanggal 19 dan 20 September 2021 (Gambar 2 dan Gambar 3) • Versi online: https://www.nusabali.com/berita/102672/desa-adat-benteng-kebangkitan-desa-wisata#.YUbaCP0ua4M.whatsapp
5.	Publikasi Video pada kanal YouTube	Finished dan Uploaded	Draft video dapat diakses pada tautan https://youtu.be/f7rcDBhB26M
6.	Website	Done	www.tegallinggah.com

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Mitra dari penelitian ini adalah Bendesa Adat Tegallinggah yang merupakan “Kepala” Desa Adat Tegallinggah yang berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Adapun peran Desa Adat Tegallinggah selama pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menyiapkan tempat untuk kegiatan lapangan selama penelitian.
- 2) Menggerakkan masyarakat setempat untuk ikut terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
- 3) Ikut memberikan input melalui kegiatan FGD.
- 4) Memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Desa Bedulu untuk melibatkan Pokdarwis Desa Bedulu dalam kegiatan penelitian ini.
- 5) Mitra ikut serta dalam menyempurnakan draft naskah akademik dan selanjutnya akan diserahkan kepada mitra.

Adapun bukti pendukung keterlibatan mitra disajikan pada Gambar 4, yaitu pada kegiatan FGD Diseminasi hasil penelitian yang didukung penuh oleh mitra dengan menghadirkan Perbekel Desa Bedulu, Pokdarwis, serta tokoh masyarakat.



Gambar 4. Salah Satu Keterlibatan Mitra, Bendesa Adat Tegallinggah (no.3 dari kiri) Dalam Proses FGD

(Hadir bersama Perbekel Bedulu, BPBD Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar)

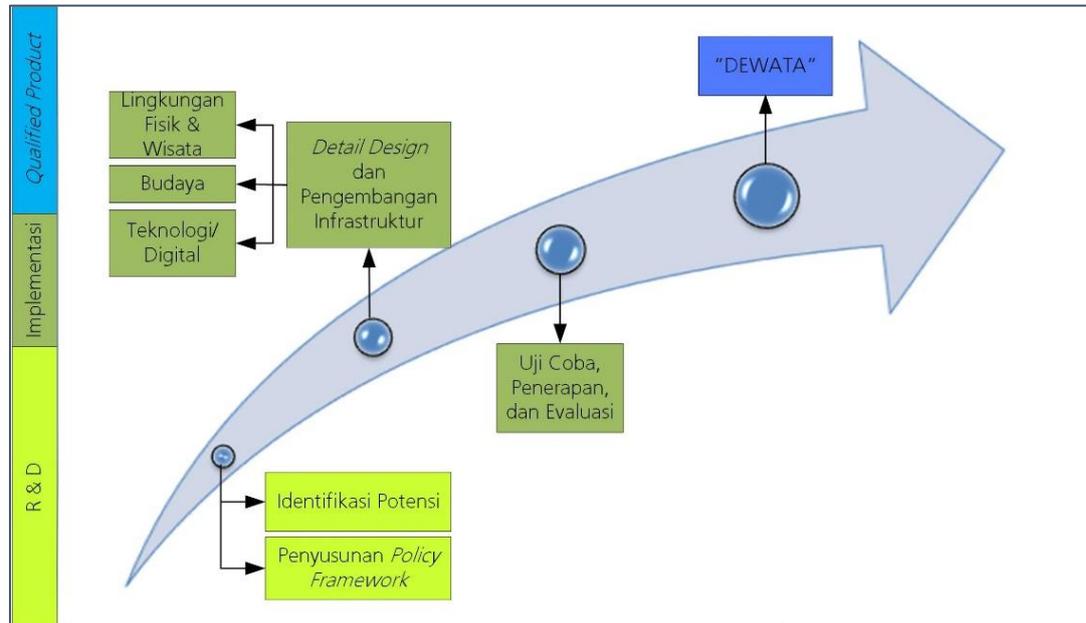
F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Secara umum, pada proses penelitian dan mencapai luaran penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Selama periode pelaksanaan penelitian, di Bali berlaku PPKM Darurat Level 4, sehingga kegiatan sempat tertunda dan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
- 2) Masyarakat di lokasi mitra, khususnya pokdarwis dan pemuda, belum banyak yang memiliki kemampuan dalam IT, termasuk pengelolaan website. Sehingga ketika proses input, dalam pengumpulan bahan harus didampingi atau peneliti yang banyak berperan.
- 3) Sesuai dengan pedoman teknis IDEATHON Bali Kembali (halaman 8), dimana disebutkan bahwa peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitiannya dalam seminar internasional/nasional pada saat peringatan Bulan PRB, namun hingga penyusunan laporan akhir panitia menginformasikan seminar internasional/nasional pada saat peringatan Bulan PR tidak diselenggarakan, sehingga hasil penelitian ini diseminarkan pada Conference/Seminar Nasional, SENASTEK (Seminar Nasional Sains, Teknologi dan Humaniora 2021) yang diselenggarakan pada tanggal : 24-26 November 2021.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Penelitian mengenai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) di Desa Adat Tegallingah sangat potensial untuk dijadikan *role model* dan dikembangkan sebagaimana roadmap penelitian dan implementasi pada Gambar 5.



Gambar 5. Roadmap Penelitian

Pengembangan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) diawali dengan penyusunan *policy framework* yang bersifat holistik sebagaimana telah dilaksanakan pada penelitian ini. Pada tahun berikutnya direncanakan penelitian untuk tahap persiapan implementasi, melalui kegiatan sosialisasi dan persiapan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan uji coba implementasi untuk kemudian dapat dilakukan revisi dan perbaikan pada sistem dan implementasi pelaksanaan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) yang dibangun.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Zakaria, T. 2018. Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Tesis. Universitas Terbuka.
2. Fauzi, A. 2019. Teknik Analisis Keberlanjutan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis

Target: Tersedia

Dicapai: Tersedia

Dokumen wajib diunggah:

1. Dokumentasi Luaran

Dokumen sudah diunggah:

1. Dokumentasi Luaran

Dokumen belum diunggah:

- Sudah lengkap



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERAREM
PENGEMBANGAN DESA ADAT
SEBAGAI DESA WISATA TANGGUH
BENCANA BERBASIS DIGITAL
("DEWATA")



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN *PERAREM*
PENGEMBANGAN DESA ADAT SEBAGAI DESA WISATA
TANGGUH BENCANA BERBASIS DIGITAL (“DEWATA”)

TIM PENELITI:

Dr. PUTU YUDY WIJAYA, SE., M.Si.
Dr. NI NYOMAN RENI SUASIH, S.IP., M.Si.
Dr. I PUTU SASTRA WIBAWA, SH., MH.
KADEK OKI SANJAYA, S.Pd., M.Kom.
I KOMANG TRYANA MERTAYASA

KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan *Perarem* Tentang Pengembangan Desa Adat Sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”).

Naskah akademik ini merupakan luaran wajib dari pelaksanaan penelitian IDEATHON Bali Kembali dengan judul *Policy Framework* Pengembangan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”). Adapun mitra penelitian tersebut adalah Desa Adat Tegallinggah yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Naskah akademik ini dapat dijadikan dasar oleh Desa Adat Tegallinggah dalam penyusunan rancangan *Perarem* Tentang Pengembangan Desa Adat Sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”).

Akhir kata tim penyusun menyampaikan terimakasih atas semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi Desa Adat Tegallinggah khususnya, dan kemajuan Desa Adat di Bali pada umumnya.

Denpasar, 29 September 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Metode Penyusunan	5
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A. Kajian Teoretis.....	6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma.....	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Desa Adat Lain	19
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Perarem Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Desa Adat....	20
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	21
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	27
A. Landasan Filosofis	27
B. Landasan Sosiologis	27
C. Landasan Yuridis.....	28
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERAREM	29
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	29
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perarem	29
BAB VI. PENUTUP	31
A. Simpulan	31
B. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN DRAFT PERAREM	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

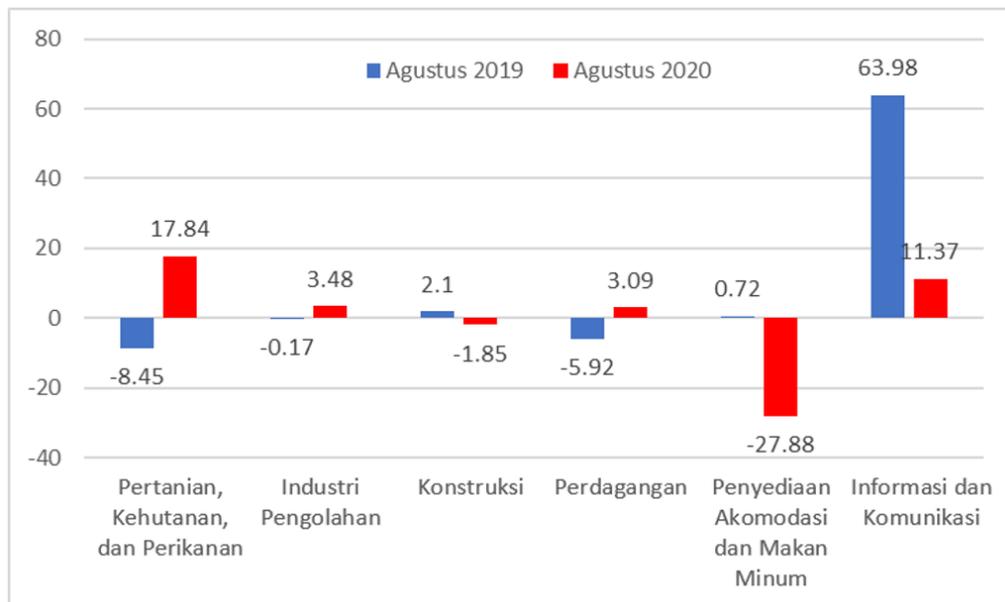
Untuk mencegah penyebaran virus Corona, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah (*stay at home*), baik bekerja, belajar, maupun beribadah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjauhi kerumunan serta mengurangi bepergian, termasuk *travelling*. Hal itu mengakibatkan tempat-tempat umum maupun tempat tujuan wisata menjadi sepi dan banyak yang tidak beroperasi (Wijaya dan Suasih, 2020). Demikian pula yang terjadi di Provinsi Bali, dimana mobilitas masyarakat di luar rumah mengalami penurunan bila dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 (Gambar 1).



Sumber: Google Mobility Report (2021)

Gambar 1. Perubahan Mobilitas Masyarakat di Provinsi Bali (per 9 Maret 2021)

Provinsi Bali yang mengandalkan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi tentu sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Tenaga kerja sektor pariwisata di Bali kehilangan pekerjaan atau beralih profesi, seperti Gambar 2 yang menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Ada juga yang memutuskan untuk kembali ke desa, sehingga ada peningkatan pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



Sumber: BPS Provinsi Bali (2021)

Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama di Provinsi Bali per November 2020

Ekonomi Provinsi Bali sejak triwulan pertama 2020 terus mengalami kontraksi, dan pada akhir tahun 2020 tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia (BPS Provinsi Bali, 2021). Meski begitu, sebagai daerah yang didukung oleh industri pariwisata, lapangan usaha di bidang penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat sebagai lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Bali (17,56%). Hal itu menunjukkan bahwa peran sektor pariwisata masih dominan, meskipun saat ini didominasi wisatawan domestik. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada triwulan IV tahun 2020 tercatat hanya 266 kunjungan, atau menurun 99,98% (*year on year*) (BPS Provinsi Bali, 2021).

Adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali membuat pemerintah maupun pelaku pariwisata mulai melirik wisatawan domestik. Mengingat adanya tenaga kerja sektor pariwisata yang kembali ke desa, maka pengembangan desa wisata melalui partisipasi masyarakat setempat sangat potensial untuk dikembangkan. Desa merupakan teritori yang lekat dengan adanya kesamaan budaya, serta control yang relatif lebih mudah, sehingga penerapan pariwisata berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) bisa diterapkan.

Desa Adat Tegallingah merupakan salah satu desa adat di Bali yang mengembangkan wisata perdesaan, namun telah memiliki obyek serta sarana penunjang yang memadai. Seperti adanya obyek wisata Candi Tebing Tegallingah (Gambar 3). Selain itu, terdapat beberapa *villa* maupun *homestay* dan ragam atraksi kesenian inovatif yang dikembangkan masyarakat setempat (Gambar 4).



Gambar 3. Obyek Wisata di Desa Adat Tegallingah



Gambar 4. Fasilitas Penunjang Wisata dan Atraksi Kesenian di Desa Adat Tegallingah

Pemerintah menilai Bali sebagai daerah terbaik dalam penanganan COVID-19, karena peran Desa Adat, sehingga pengembangan wisata dapat sejalan dengan konsep desa tangguh bencana melalui Desa Adat (Mandira dan Yudha, 2021). Selain itu, diperlukan sentuhan inovasi digital dalam pengembangan konsep desa wisata (*e-tourism*), untuk membuat calon wisatawan tertarik serta menjadi pembeda dengan wisata sejenis lainnya, apalagi desa wisata di Bali yang memanfaatkan digitalisasi masih minim (Nirmala dan Lavianto, 2019). Sehingga pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital (“DEWATA”) menjadi penting dan perlu dilandasi oleh Perarem Desa Adat. Apalagi obyek wisata Candi Tebing Tegallingah telah dikelola melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Adat Tegallingah, dan tentunya pengembangan pariwisata di Desa Adat Tegallingah sangat potensial.

B. Identifikasi Masalah

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi wisata yang lokasinya berada di desa adat perlu terus ditumbuhkembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh

karena itu, potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan.

Dengan melihat potensi yang ada di Desa Adat Tegallingsah, maka salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan Prajuru Desa Adat adalah dengan mengatur pokok-pokok kebijakan implementasi desa wisata pada Desa Adat Tegallingsah melalui Perarem.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital:

- 1) Fenomena yang muncul bahwa dalam pengelolaan obyek wisata oleh desa adat, termasuk Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar belum ada pedoman pedoman tentang kebijakan di Desa Adat Tegallingsah terkait hal tersebut.
- 2) Potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Adat Tegallingsah belum diidentifikasi serta dikelola secara optimal dan profesional.
- 3) Untuk dapat beradaptasi dalam era new normal dan berdampingan dengan COVID-19, Desa Adat belum mengatur secara spesifik terkait bidang pariwisata.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam kegiatan masyarakat adat, termasuk dalam pengelolaan kegiatan wisata di Desa Adat Tegallingsah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini antara lain:

- 1) Untuk mengkaji aspek filosofis, sosiologis, yuridis tentang potensi Desa Adat Tegallingsah sebagai dasar untuk pengembangan pariwisata, pembangunan ekonomi, dan peningkatan daya saing desa dengan memanfaatkan potensi alam, sosial, budaya, dan teknologi sebagai prasarana dan sarana daya tarik wisata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan krama Desa Adat Tegallingsah.
- 2) Sebagai sebuah naskah akademik, maka akan dijadikan rujukan dan pedoman dalam menyusun rancangan Perarem tentang Pengembangan Desa Adat Sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital.

Adapun manfaat penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perarem Desa Adat Tegallingsah tentang Pengembangan Desa Adat Tegallingsah Sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital.

D. Metode Penyusunan

Adapun metode kajian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi:

- 1) Yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah, hingga awig-awig dan perarem sebelumnya yang dijadikan dasar kewenangan pembentukan perarem, dan dasar pengaturan materi muatan rancangan perarem.
- 2) Empiris-sosiologis, yaitu mengkaji kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di masyarakat desa adat terkait dengan kepariwisataan pada era new normal sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengaturan materi muatan di dalam rancangan Perarem tentang Pengembangan Desa Adat Sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital.

Untuk memperoleh data terkait dengan kajian empiris-sosiologis ini digunakan instrumen sebagai berikut:

- a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan (Desa Adat Tegallinggah) untuk melihat potensi dan kondisi yang ada terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan perarem.
- b) Interview, yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh budaya setempat serta perangkat daerah dan aparat desa.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata di daerah merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menampilkan potensi kekayaan alam dan budaya daerah kepada para pendatang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan desa, melalui penjualan produk wisata yang diproduksi oleh masyarakat. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut (UU Nomor 9 Tahun 1990). Dalam prakteknya pariwisata mempunyai kaitan erat dengan waktu senggang dan rekreasi, yang mana pariwisata termasuk salah satu bagian aktivitas rekreasi. Rekreasi diartikan sebagai suatu aktivitas secara sadar dilakukan dalam waktu senggang yang memberi pengaruh bagi kondisi atau dayakreatif serta dilakukan dengan keinginan sendiri tidak karena paksaan dari pihak lain (Santoso, 2002).

Dari batasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang terkandung dalam kepariwisataan, yaitu:

- a) perjalanan dilakukan untuk sementara waktu.
- b) perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya.
- c) perjalanannya harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- d) orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi semata-mata hanya sebagai konsumen.

Beberapa konsep kepariwisataan dalam UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan disebutkan sebagai berikut:

- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- b) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

- c) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
- d) Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- e) Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
- f) Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- g) Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

2. Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Bentuk atau sifat kepuasan yang diperoleh bagi setiap orang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat karena sifat dari orangnya sendiri yang memang sudah berbeda dan juga dapat karena perbedaan jenis objek wisatanya. Sesuai dengan fungsi dari kegiatan pariwisata, pariwisata dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, yakni:

a) Pariwisata Pendidikan

Kepuasan yang diperoleh dari jenis kegiatan pariwisata pendidikan lebih bersifat wisata rombongan berupa studi tour, studi banding atau yang lainnya. Wisata pendidikan mempunyai tujuan untuk menunjukkan, mengenalkan atau melihat variasi objek, kehidupan seperti dalam usaha mengenal kehidupan alam, tumbuh-tumbuhan dan lainnya.

b) Pariwisata Olah Raga

Melakukan pertandingan olahraga atau bermain sendiri, dengan keluarga seperti bermain tennis di daerah pegunungan yang sejuk, kegiatan ini sekaligus termasuk pada kegiatan wisata. Kepuasan dan kenikmatan yang didapat adalah karena kegiatan olahraga dan karena tujuan berkunjung ke daerah objek wisata adalah untuk berolahraga, maka kegiatan wisata ini tergolong pada jenis pariwisata olah raga.

c) Pariwisata Kebudayaan

Pariwisata kebudayaan merupakan kegiatan wisata dengan mengunjungi tempat atau daerah-daerah yang memiliki kebudayaan yang diinginkan. Kebudayaan dapat berupa kesenian daerah, adat istiadat masyarakat tertentu atau suatu bangunan museum. Objek ini merupakan karya seni dan budaya yang dapat diberikan kepada orang lain dan dapat memberikan rasa senang dan rasa puas.

d) Pariwisata Kesehatan

Pariwisata merupakan konsumsi penting bagi orang-orang yang waktunya banyak terserap dalam pekerjaannya, sehingga rekreasi dapat membuat kesegaran jasmani maupun rohani. Melalui kegiatan pariwisata dapat memberikan kenyamanan karena hiburan dapat menumbuhkan vitalitas kehidupan yang akan sangat berpengaruh bagi kesehatan, khususnya kesehatan rohani. Pariwisata sebagai obat untuk menghilangkan tekanan-tekanan kehidupan yang dialami dalam rutinitas kegiatan.

e) Pariwisata Ekonomi

Melakukan pariwisata atau rekreasi dikerjakan pada saat atau suasana yang sangat memungkinkan, artinya tidak sedang terkait oleh suatu pekerjaan, sehingga dalam bahasa pariwisata kegiatan pariwisata dilakukan pada waktu senggang.

f) Pariwisata Sosial

Satu jenis pariwisata lain yang bersifat sosial seolah-olah tidak mempunyai kaitan dengan tujuan pariwisata secara umum. Namun sebenarnya kegiatan-kegiatan pariwisata sendiri mempunyai tujuan yang tersembunyi. Daerah atau objek wisata merupakan tempat berkumpulnya orang banyak yang mempunyai latar belakang sosial budaya berbeda dan yang mempunyai tujuan wisata yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pengunjung objek wisata dituntut dapat menghargai dan menghormati hak atau karya orang lain. Hal ini mencerminkan adanya usaha-usaha untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat mentaati aturan dan larangan yang ditentukan oleh pengelola objek wisata (Sujali, 1989).

3. Motivasi Melakukan Perjalanan Pariwisata

Secara khusus perjalanan dapat berbentuk perjalanan untuk rekreasi dan wisata yang terbagi ke dalam tiga kategori utama yaitu perjalanan untuk beristirahat dan relaksasi, perjalanan bisnis. Dan perjalanan wisata terbagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

a) Menemui Keluargadan Teman (*visiting friends and relation*)

Termasuk di dalamnya adalah pulang kampung atau mudik. Perjalanan ini menjadi salah satu sumber penghasilan devisa dari kegiatan penduduknya di luar negeri.

b) Urusan Bisnis dan Dinas

Urusan bisnis dan dinas saat ini merupakan salah satu komponen penting dan mampu menghasilkan pemasukan yang besar. Termasuk dalam jenis perjalanan ini adalah perjalanan untuk rapat, perjalanan insentif, konvensi, konperensi, dan eksibisi atau eksposisi yang dikenal sebagai *MICE Industry (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibitions)*.

c) Ziarah

Bentuk perjalanan ziarah merupakan salah satu motivasi melakukan perjalanan wisata yang memiliki kemampuan yang besar dalam memperbesar penerimaan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat tertentu. Bila di Bali dikenal juga istilah *Tirta Yatra* dan *Dharma Yatra* yang merupakan perjalanan ke sumber mata air suci dan ke pura-pura.

d) Melihat dan Mempelajari Hal-hal baru

Perjalanan wisata ditujukan untuk mencari kebahagiaan batin dengan melihat dan menikmati hal-hal baru yang tidak ditemui di tempat tinggalnya.

e) Mempelajari Kehidupan, Mata Pencaharian dan Adat Istiadat Masyarakat Lain

Pergi ke kota-kota besar dunia melihat bagaimana mereka hidup dan beradaptasi dengan kondisi setempat merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Pihak orang asing merasa tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat desa kita hidup.

f) Mempelajari Cara Hidup Nenek Moyang

Bagi Sebagian kecil warga keturunan, pergi berwisata ke Beijing merupakan salah satu motivasi yang kuat untuk mempelajari tempat asal usul mereka dan bagaimana nenek moyang mereka hidup pada masa lalu.

- g) Melakukan Hal-hal yang Tidak Dapat Dilakukan di Tempat Kediaman.
Bagi beberapa orang Indonesia menggemari permainan ski, pergi ke St.Moritz atau Colorado merupakan keharusan karena kegiatan tersebut tidak dapat secara leluasa dilakukan ditanah air.
- h) Beristirahat dan Relaks
Pergi berakhir pekan di suatu tempat yang berbeda dari tempat tinggalnya adalah merupakan salah satu motivasi yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan istirahat dan relaks dari rutinitas yang mereka hadapi sehari-hari.
- i) Meningkatkan Kesehatan Jiwa dan Raga
Pergi ke tempat tempat seperti air panas untuk menyehatkan diri dari penyakit tertentu merupakan salah satu motivasi manusia untuk meningkatkan Kesehatan jiwa dan raga. Termasuk di dalamnya adalah pergi ke tempat yang tenang adalah suatu jalan untuk meningkatkan kesehatan jiwa (Makalam,1996).

4. Pengembangan Kepariwisataaan

Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencakup juga dampak yang terkait, seperti penyerapan atau penciptaan tenaga kerja ataupun perolehan atau peningkatan pendapatan.

Dalam pengembangan kepariwisataan bukan saja ditentukan pada objeknya, akan tetapi juga harus memperhatikan pada fasilitas pendukungnya. Untuk memuaskan wisatawan di tiap objek wisata harus memiliki lima unsur yang bergantung yaitu atraksi (*attraction*), fasilitas (*facilities*), atau pelayanan, infrastruktur (*infrastructure*), transportasi (*transportation*), akomodasi (*accommodation*).

Unsur-unsur pengembangan kepariwisataan antara lain:

- a) Atraksi; atraksi atau daya tarik dapat menyebabkan wisatawan datang, yang kedatangannya mungkin adanya transportasi, akomodasi, dan lain-lain memudahkan berlangsungnya perjalanan wisata yang sengaja dibangun, kemudian orang tertarik juga untuk melakukan kegiatan wisata yang lainnya.

- b) Transportasi; perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan perkembangan akomodasi, fleksibilitas arah perjalanan dalam objek wisata.
- c) Akomodasi; akomodasi atau tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, tempat pondokan, tempat berkemah masa liburan) dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung atau menginap keluarga dan perkumpulan terbatas. Dalam perkembangannya macam-macam akomodasi berubah menjadi lebih fleksibel baik dalam bentuk maupun pengelolaannya.
- d) Fasilitas dan Pelayanan; penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan arus wisatawan. Pelayanan jasa untuk kenyamanan dan jasa penjualan barang mewah.
- e) Infrastruktur; Infrastruktur menjadi andalan utama dalam bidang kepariwisataan. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayan dan fasilitas pendukung bagi objek wisata. Dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat di samping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik dan juga pembuangan saluran air limbah (Santoso, 2002).

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a) industri Desa Wisata;
- b) objek Desa Wisata;
- c) pemasaran Desa Wisata; dan
- d) kelembagaan Desa Wisata.

Pembangunan dan pengembangan industri wisata pada desa wisata dimaksudkan untuk memperkaya produk wisata sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pengembangan industri wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam berkreasi mengembangkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam bentuk; kerajinan tangan sebagai cinderamata, kuliner dan lain-lain industri wisata. Pengembangan obyek wisata pada desa wisata dimaksudkan adalah pembangunan dan pembenahan terhadap destinasi wisata melalui

penyediaan parasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti; prasaana jalan, fasilitas umum, prasarana dan sarana untuk atraksi budaya, termasuk fasilitas ibadah. Pemasaran Desa Wisata adalah kegiatan promosi yang dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tentang keberadaan dari Desa Wisata dengan segala potensi, kondisi, dan atraksi wisatanya. Kelembagaan desa wisata merupakan komponen yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan desa wisata, karena *stakeholders* dan institusi tersebut akan berperan dalam penyelenggaraan desa wisata.

5. Wisata Perdesaan dan Desa Wisata

Terkait dengan pengembangan wisata perdesaan terdapat dua konsep, yaitu wisata pedesaan (*village tourism*) dan desa wisata (*tourism village*). Wisata perdesaan adalah kegiatan wisata yang hanya menekankan kegiatan wisata di destinasi wisata di desa dengan kegiatan wisata yang tidak terfokus pada kegiatan masyarakat di dalamnya. Menurut Hadiwijoyo (2012), desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makananminuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Dari dua konsep tersebut perbedaannya tampak jelas, yakni adanya pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat dan sumber daya di desa.

Desa wisata ternyata memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi beban berat kota akibat urbanisasi. Namun, dalam pembentukannya diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut banyak aspek.

Konsep desa wisata merupakan konsep yang dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa wisata dibentuk, selain untuk menurunkan tingkat urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan, serta memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Pengelolaan desa wisata menganut sistem *sharing profit* yang sangat bertolak belakang dengan

sistem business oriented. Maka tolok ukur keberhasilan desa wisata bukan hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi partisipasi masyarakat untuk mendapat kesejahteraan. Dalam desa wisata berbagai pihak mendapatkan manfaat sekaligus membuat desa tetap lestari. Beberapa kriteria harus dipenuhi untuk menjadi desa wisata. Kriteria tersebut di antaranya adalah kegiatan pariwisata harus berbasis pada sumber daya pedesaan, yang mengakomodir segala potensi desa untuk mendukung kegiatan pariwisata. Sedikitnya terdapat sepuluh aset dan potensi desa untuk tujuan tersebut, yakni sumber daya manusia, komoditas pertanian, sumber daya alam, kelembagaan, aset sosial, spiritual budaya, finansial, fisik infrastruktur, sumber daya informasi, dan jaringan.

Kriteria berikut adalah kegiatan melibatkan wisatawan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan perdesaan atau ada interaksi langsung antara wisatawan dengan penduduk lokal. Kegiatan bertani, berkebun, beternak yang merupakan aktivitas sehari-hari penduduk desa dapat menjadi atraksi wisata. Wisatawan belajar dan merasakan langsung untuk hidup dan bekerja sebagaimana orang desa.

Interaksi langsung juga dibangun di tempat menginap yaitu *homestay*. *Homestay* harus memadai yang berarti rapi, bersih dan memiliki kamar mandi sesuai standar kesehatan. *Homestay* pada desa wisata dimaknai sebagai rumah yang dihuni penduduk lokal. Setiap *homestay* menyediakan satu kamar untuk ditinggali wisatawan, sedangkan pemilik menempati kamar lain di dalam rumah yang sama.

Kegiatan rekreasi berorientasi pada kegiatan luar ruang (*outdoor recreation*) yang umumnya untuk menikmati keindahan alam yang dapat berupa sungai, air terjun, gunung, pantai, dan hutan. Namun desa wisata juga menyediakan keunikan budaya masyarakat dengan menyuguhkan kesenian tradisional.

Desa wisata harus menghargai dan menjaga budaya lokal. Konsekuensi dari keberadaan destinasi wisata adalah hadirnya wisatawan dari luar desa yang memiliki budaya berbeda. Maka desa wisata harus mampu melindungi kearifan lokal desa sehingga tidak berubah karena pengaruh luar. Wisatawan harus mendapat pemahaman tentang perbedaan tersebut dan diminta mengikuti kebiasaan setempat.

Akses yang memadai untuk menuju maupun di dalam desa wisata perlu pula mendapat perhatian. Keselamatan merupakan hal utama dalam kegiatan wisata, maka desa wisata harus memiliki layanan khusus dan kemampuan mencegah/mengatasi timbulnya bahaya atau kecelakaan. Pembangunan desa wisata memerlukan dukungan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata di tingkat desa maupun di atasnya. Dukungan masyarakat dapat ditumbuhkan melalui penanaman kesadaran wisata. Untuk itu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) perlu ada terlebih dahulu sebelum terbentuk desa wisata. Pokdarwis memiliki peran utama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat umum. Selain Pokdarwis, dapat pula dibentuk kelompokkelompok lain guna mendukung keberadaan desa wisata.

6. Konsep Desa Adat Tangguh Bencana (COVID-19)

Saat ini, diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi cobaan yang berat yaitu adanya COVID-19. Mengingat COVID-19 merupakan salah satu virus yang dapat menyebabkan kematian, maka pencegahan harus dilakukan. Dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang, Desa Adat Tangguh Bencana dapat digunakan masyarakat untuk menghadapi COVID-19.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, instalasi Desa Adat Tangguh Bencana merupakan upaya untuk melakukan Upaya Kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit. Upaya Kesehatan berdasar Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Desa Adat Tangguh Bencana merupakan konsep *generic* yang memiliki tiga komponen utama yakni basis teori, level gerakan, dan pola gerakan. Pertama, Desa Adat Tangguh Bencana sepenuhnya memanfaatkan teori "*social movement*" sebagai basis gerakan, "*teori of space*" sebagai rujukan untuk penguasaan teritori, "*social practices theory*" untuk mengarahkan perilaku

orang, serta *"progressive leadership theory"* untuk sistem komando. Pada saat bersamaan, Desa Adat Tangguh Bencana menggunakan prinsip-prinsip dasar kerja sistem android sehingga semakin banyak ketanggunan-ketangguhan atau Apps diinstallkan, maka semakin tangguh sistem karena semakin banyak Apps berarti semakin banyak orang yang tergantung padanya. Prinsip dasar dan basis teori ini dioverlapkan hingga menjadi satu kesatuan konsep Desa Adat Tangguh Bencana. Dalam konteks perlawanan terhadap COVID, sebagaimana sistem pada umumnya, maka Desa Adat Tangguh Bencana harus memiliki tiga pilar utama yakni alat dan prasarana, personel, dan manual prosedur sekaligus aturan-aturan. Tiga pilar tersebut dikendalikan oleh sistem komando, mulai dari Bandesa Adat hingga pemerintah daerah, bahkan hingga presiden. Kenapa demikian, Desa Adat Tangguh Bencana ini dapat menjadi semacam tempat mendarat paling bawah dari program-program pemerintah nantinya setelah COVID 19 berakhir.

Secara logis, menghadapi bencana COVID 19 tidak mungkin kita mengandalkan sepenuhnya pada cara sederhana sebagaimana yang dilakukan oleh para Bandesa Adat atau Desa Adat di seluruh Bali saat ini. Perlu rekayasa sosial yang baik dan efektif sehingga potensi masyarakat lokal menjadi lebih bermanfaat dan terarah untuk bersama-sama menghadapi bencana COVID 19 yang berbeda karakternya dengan bencana biasa. Mensistemkan tiga pilar tersebut menjadi gerakan lebih masif perlu dioverlapkan dengan pendekatan lain, yakni penguasaan *teritory* sebagai unsur pertahanan dan penegakan tertib sosial sebagai pendekatan keamanan, sementara fungsi pelayanan sosial dikerjakan oleh pemerintah.

Kedua, level gerakan Desa Adat Tangguh Bencana rata-rata setingkat Desa Adat karena (1) gangguan (*noise*) politik relatif rendah dibanding Banjar, (2) SDM Bandesa relatif lebih baik dan seragam, (3) Desa Adat masih memiliki sosial kapital tinggi sehingga mudah digerakan, (4) urusan-urusan seperti keamanan lingkungan dan pelayanan sosial selama ini dikelola setingkat Desa Adat, (5) para Bandesa Adat rata-rata bukan rumah tangga miskin, dan (6) dengan jumlah KK sekitar 400 hingga 600 maka dapat dijangkau secara personal langsung tanpa penghubung lagi jika salah satu warganya ada masalah. Dengan pertimbangan di atas, maka Desa Adat menjadi level gerakan

yang paling efisien karena ada overlapping antara penguasaan teritori, ketersediaan personel, dan kepemimpinan, yang ketiganya merupakan hal-hal dasar yang harus dikelola siapapun jika membangun program atau gerakan social.

Ketiga, pola gerakan Desa Adat Tangguh Bencana merupakan gerakan lokal berjejaring hingga nasional untuk mendukung gerakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID 19 dalam jangka panjang. Bisa bersamaan mendukung PSBB juga bisa sebagai gerakan perlawanan setelahnya mengingat PSBB tidak serta merta menghentikan COVID. Desa Adat Tangguh Bencana merupakan kemampuan lokal yang terukur dan tersistem guna menghadapi berbagai gangguan keamanan dan pertahanan wilayah yang berguna untuk menangkal berbagai gangguan dari luar termasuk bencana alam. Mengorganisir satuan sosial tertentu akan sangat berguna untuk membantu berbagai gerakan struktural yang dilakukan pemerintah saat ini.

Dengan demikian, Desa Adat Tangguh Bencana akan sangat membantu masyarakat pada level lokal agar mereka mampu mengorganisir seluruh sumberdaya yang mereka miliki menjadi lebih efektif. Meskipun penerjemahannya akan sangat beragam sesuai dengan potensi kampung tersebut, tetapi secara prinsip fungsi-fungsi koordinasi dengan sistem di atasnya terjalin sehingga akan menjadi semacam "akar" serabut struktur satgas di atasnya yang mampu masuk dalam ke rumah tangga-rumah tangga bahkan individu. Jadi posisi organisasi Desa Adat Tangguh Bencana ini benar-benar menjadi kaki paling bawah selain juga unit terkecil pengendalian masyarakat untuk menghadapi perang panjang melawan corona yang tidak jelas kapan berakhirnya. Pola gerakan Desa Adat Tangguh Bencana tidak membangun struktur baru, hanya menambah personel dari struktur yang ada dengan skill ketangguhan tertentu, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk membangun personel pada tingkat lapang.

7. Desa Digital

Sebagaimana diketahui bahwa di Provinsi Bali terdapat Desa (Desa Dinas) dan Desa Adat. Selama ini pembentukan Desa Digital diarahkan ke Desa Dinas, padahal Desa Adat juga sangat perlu dikembangkan menjadi Desa Digital,

karena pengelolaan pada level Desa Adat juga semakin kompleks. Berikut akan dipaparkan konsep Desa Digital yang dipedomani dalam pembentukan desa digital pada kelompok Desa Dinas yang kiranya dapat diadopsi oleh Desa Adat meskipun tidak seluruhnya.

Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik. Dalam desa digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat digital akan mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki. Selain itu, desa digital juga akan memperlancar penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ekonomi, desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada desa digital direncanakan akan memiliki website dan akun media sosial untuk promosi dan berita, sistem e-commerce serta aplikasi yang sesuai dengan karakter dan potensi ekonomi di tiap desa.

Hingga saat ini, pembentukan beberapa desa digital merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam pembentukan desa digital, pemerintah daerah mengajukan usulan kepada Kemkominfo sebagai pihak yang menyediakan layanan internet. Sebelum ada program desa digital, telah ada program serupa yaitu desa broadband terpadu yang dijalankan oleh Kemkominfo bagi desadesa yang termasuk dalam daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Desa broadband terpadu merupakan upaya pemerintah menjangkau desadesa agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kesejahteraannya. Desa Mandalamekar di Kabupaten Tasikmalaya dan Desa Rawabiru di Kabupaten Merauke merupakan contoh dua desa broadband dari 278 yang sudah dibentuk oleh Kemkominfo. Dengan program desa broadband terpadu, Kemkominfo melalui BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) menyediakan

jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk, dan pendampingan yang tepat untuk masyarakat di desa 3T dan lokasi prioritas (LokPri) yang meliputi desa petani, desa nelayan dan desa pedalaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas akses ke pasar. Melalui penerapan teknologi dan informasi di desa digital diharapkan produktivitas dapat meningkat mengikuti kisah sukses desa lainnya dalam penggunaan internet.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar tentu dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kebutuhan, budaya, dan nilai-nilai yang ada di desa adat sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat, termasuk dalam pembangunan kepariwisataan. Pembangunan pariwisata terkadang menimbulkan kesan yang negatif bagi masyarakat karena dianggap mengganggu nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan masih tetap dipertahankan.

Oleh karena itu, dalam penetapan, pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata, maka harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas manfaat, yaitu pembangunan pariwisata harus dapat dirasakan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.
- b) Asas kekerabatan, yaitu hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial harus tetap diperhatikan.
- c) Asas kelestarian, yaitu bahwa budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat harus tetap dipertahankan dan dijaga eksistensinya.
- d) Asas partisipatif, yaitu keterlibatan (peran serta) masyarakat harus menjadi bagian dari penancangan, penetapan, dan pelaksanaan desa wisata, sehingga masyarakat merasa memiliki program yang dicanangkan oleh mereka.

- e) Asas berkelanjutan, yaitu penyelenggaraan desa wisata harus tetap dilakukan sebagai suatu kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Desa Adat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Desa Adat Tegallingah sangat potensial dikembangkan sebagai desa wisata. Apalagi Desa Adat telah melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk bersama-sama mengelola objek wisata Candi Tebing Tegallingah. Hal ini tentunya menjadi titik awal yang baik bagi pengembangan desa wisata.

Pandemi COVID-19 memang berdampak besar terhadap pariwisata, oleh karena itu, konsep desa wisata juga perlu diintegrasikan dengan mewujudkan desa adat Tangguh bencana COVID-19. Apalagi Presiden RI pernah memuji peran Desa Adat di Bali dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 (Suasih et al., 2021).

Selain itu, selama masa pandemi COVID-19 tidak dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan menjadi salah satu media utama kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan desa adat sebagai desa wisata juga perlu diintegrasikan dengan konsep desa digital. Seperti misalnya penerapan digitalisasi *tourism* untuk melakukan promosi atau penawaran produk wisata.

Desa Adat Tegallingah masih memiliki beberapa keterbatasan untuk dapat mengimplementasikan konsep "DEWATA" secara penuh. Permasalahan tersebut dialami baik pada aspek desa wisata, desa tangguh bencana, maupun desa digital. Pertama, terkait desa wisata, dimana penataan obyek wisata di Desa Adat Tegallingah baru terfokus pada Candi Tebing Tegallingah dan hanya mengandalkan proyek penataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Masyarakat belum aktif untuk berpartisipasi, termasuk masih lambatnya perkembangan sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti UMKM, kuliner dan sebagainya. Kedua, terkait desa tangguh bencana, dimana Desa Adat Tegallingah mengalami keterbatasan dana operasional untuk keberlanjutan aktivitas Satgas sebagaimana instruksi dari Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu diperlukan

partisipasi masyarakat secara sukarela dan swadaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana. Ketiga, terkait desa digital dimana SDM di Desa Adat Tegallingah yang mampu mengelola Teknologi informasi dan komunikasi secara professional masih terbatas. Apabila menggunakan jasa pihak ketiga, tentu dana yang dibutuhkan tidak sedikit.

Beberapa Desa Adat di Bali telah sukses dalam melakukan pengelolaan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan komparasi, seperti halnya Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli. BNPB pada tanggal 2 Desember 2020 melakukan kunjungan ke Desa Adat Kerobokan untuk melihat bagaimana suatu desa wisata yang notabene penduduknya bekerja di sektor pariwisata kemudian beralih ke pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Adat memiliki peran sentral dalam mitigasi bencana akibat pandemi COVID-19. Bendesa Adat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Ketika dilantik menjadi Bandesa juga menyampaikan bahwa akan mengembangkan Desa Adat Gulingan sebagai Desa Digital. Apalagi Pemerintah Provinsi Bali telah mulai melaksanakan Sensus Sat Kerthi Semesta Bali yang berbasis desa adat. Sensus ini diselenggarakan secara digital, sehingga mau tidak mau Desa Adat (termasuk *prajuru*) harus melek digital atau didukung oleh sumber daya yang menguasai teknologi informasi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Perarem Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Desa Adat

Implementasi DEWATA diharapkan akan memberikan suatu nilai tambah dalam memperkuat peran Desa Adat di Bali pada umumnya, dan Desa Adat Tegallingah pada khususnya. Diharapkan Desa Adat tidak melulu hanya mampu berperan dalam konteks adat, tapi juga menyentuh berbagai sisi kehidupan *krama* Bali.

Seperti kita ketahui bahwa Desa Adat memiliki modal sosial yang tinggi, dimana proses pemberdayaan masyarakat di Bali akan dapat diakselerasi melalui Desa Adat. Apalagi saat ini Desa Adat telah mengatur APB Desa Adat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat) dimana dana yang dikelola cukup banyak dan tertata sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai program inovatif dalam membangun dan mewujudkan kesejahteraan *krama* Bali.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembentukan suatu Perarem, tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan pada hukum positif maupun awig-awig pada tidap desa adat, sehingga harus dilakukan pengkajian. Pengkajian dimaksudkan bahwa suatu peraturan tersebut mungkin dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah tersebut, peraturan tersebut memiliki keterkaitan materi dengan peraturan daerah yang dibentuk, dan untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan dan saling bertentangan yang menyebabkan peraturan daerah yang dibentuk dibatalkan atau batal demi hukum.

Adapun peraturan perundang-undangan maupun peraturan adat yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tersebut meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan kesempatan beruaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) menghapus kemiskinan;
- d) mengatasi pengangguran;
- e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f) memajukan kebudayaan;
- g) mengangkat citra bangsa;
- h) mempupuk rasa cinta tanah air;
- i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j) memepererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

- a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan

Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) memberdayakan masyarakat setempat;
- f) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan, namun urusan tersebut menjanjikan sumber pemasukan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang cukup potensial dengan berbagai dampak positifnya bagi daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terus menumbuhkan dan menggalangkan pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh desa-desa melalui program desa wisata. Untuk itu, pembangunan pariwisata merupakan pilihan yang realistis bagi daerah untuk dikembangkan, termasuk di desa melalui penetapan desa wisata, karena potensi wisata dan destinasi wisata pada umumnya berada di desa.

Dalam penyelenggaraannya kepariwisataan Desa Dinas ataupun Desa Adat di Bali apabila merujuk pada UU Pemerintahan Daerah, kedua tersebut dapat menerima penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang meliputi; penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa/Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa/Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Desa Adat sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 106 UU Desa. Kedua bentuk desa tersebut dalam melaksanakan penugasannya berhak menerima biaya dari Pemerintah/ Pemerintah Pusat.

Saat ini di Bali terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di ke seluruhan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali. Namun pada kenyataannya posisi antara desa dinas dan desa adat di Bali masih bias, karena Desa Dinas dan Desa Adat yang keduanya memiliki eksistensi yang sama kuat di Bali.

Apabila dilihat dari bentuknya terdapat beberapa bentuk desa di Bali sebagai berikut (Pitana, 1994):

- a) Satu Desa Dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa adat, misalnya pada beberapa desa pegunungan, seperti Serahi, Bunutin, Bonyoh, Manik Lui, dan Abang Songan;
- b) Satu Desa Dinas meliputi beberapa desa adat seperti desa dinas Luwus yang terdiri atas empat desa adat dan desa dinas mekar sari yang terdiri atas enam desa adat;
- c) Satu Desa Adat terdiri atas beberapa desa Dinas, umumnya terdapat di daerah perkotaan. Misalnya Desa Adat Denpasar, terdiri atas beberapa desa dinas dan kelurahan; Desa Adat Buleleng juga terdiri atas beberapa Desa dinas dan Kelurahan.
- d) Suatu desa dinas meliputi beberapa desa adat dan sebagian dari desa adat lainnya. Misalnya kelurahan Ubud terdiri atas enam desa adat yang sepenuhnya di Ubud, satu banjar yang berdesa adat ke Peliatan.

Bentuk Desa Dinas dan Desa Adat inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab biasanya pengelolaan kepariwisataan oleh Desa di Bali.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:

- a) destinasi pariwisata;
- b) pemasaran pariwisata;
- c) industri pariwisata; dan
- d) kelembagaan pariwisata.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan termasuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional. Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan:

- a) destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b) pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- c) Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d) organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

- a) meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b) mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- c) mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d) mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembanguana destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan indutri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah dan desa harus mengacu kepada visi dan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana induk kepariwisataan nasional.

4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Pembentukan Perda Desa Adat tidak mengacu pada UU Desa yang seharusnya apabila mengacu pada Stufenbau Theori, UU Desa selanjutnya dijadikan pedoman dalam pembentukan Perda Desa Adat di Bali. Perda Desa Adat di Bali dalam pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya merujuk Pasal 236 ayat (4) yaitu bahwa peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Biro Hukum Provinsi Bali Pada 4 Juni 2019 (Yanti, 2019).

Desa Adat yang sebelumnya didefinisikan dalam Perda Desa Prakraman sebagai berikut; "Desa prakraman adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kini dalam Perda Desa Adat didefinisikan secara berbeda sebagai berikut; "Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri." Dari kedua definisi tersebut terdapat beberapa unsur pembeda penting salah satunya pengaturan atas harta kekayaan milik desa atau yang disebut dengan istilah Padruwen Desa Adat yang sebelum tidak diatur dalam Perda Desa Prakraman.

Padruwen Desa Adat merupakan seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil. Padruwen Desa Adat yang bersifat inmateriil adalah sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu, sedangkan yang dimaksud Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil adalah wewidangan Desa Adat, tanah Desa Adat, sumber daya alam, sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat, kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat, bangunan-bangunan

milik Desa Adat, benda-benda yang bersifat religius magis, keuangan dan sarwa mulé; dan harta kekayaan materiil lainnya. Dalam pengelolaannya Padruwen Desa Adat dilaksanakan berdasarkan kemanfaatan bagi Desa Adat dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Krama Desa Adat, salah satunya melalui pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perda Desa Adat.

Destinasi dan/atau atraksi wisata tidak sepenuhnya menjadi kewenangan desa adat, dalam Perda Desa Adat telah ditentukan bahwa desa adat hanya berwenang melakukan pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata yang berdasarkan hak asal usul.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Desa Adat memiliki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan destinasi wisata yang berdasarkan pada nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pada padruwen desa adat yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat.

5) Awig-Awig Desa Adat Tegallingsah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Awig-Awig Desa Adat Tegallingsah telah ada sejak tahun 1992. Beberapa ketentuan yang antara lain mengatur tentang kekayaan desa adat (*druwe desa*).

6) Perarem Desa Adat Tegallingsah Nomor: 84/DAT/2020 tentang Pengaturan Pencegahan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Wewidangan Desa Adat Tegallingsah

Sebagai respons atas pandemi COVID-19, Desa Adat Tegallingsah telah menetapkan Perarem tentang Pengaturan Pencegahan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Wewidangan Desa Adat Tegallingsah. Ruang lingkup perarem tersebut antara lain:

- a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- b) Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat;
- c) Satuan Tugas Gotong Royong;
- d) Penanganan Kasus Terpapar;
- e) *Ngeneng Ngening* Desa Adat;
- f) Sanksi; dan
- g) Ketentuan Penutup.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan pariwisata tidak saja menjadi program daerah tetapi juga harus menjadi program yang harus dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, karena potensi pariwisata yang ada di daerah adalah berada di desa.

Pengembangan pariwisata di desa tidak dapat dilepaskan dan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai ciri khas kelokalan yang dimilikinya, dan harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di desa, karena apabila menafikan eksistensi dari nilai-nilai budaya kelokalan (kearifan lokal) maka akan terjadi gesekan-gesekan yang akan mengganggu pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang ada di desa. Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan di desa harus seiring sejalan nilai-nilai sosial budaya tersebut, bahkan harus dijadikan sebagai suatu potensi yang dapat menumbuhkan daya tarik desa sebagai sebuah destinasi wisata yang dapat menghasilkan dana dan keuangan daerah dan desa serta masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Desa Adat Tegallingsah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Adat Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) antar lain:

- a) Adanya obyek wisata Candi Tebing Tegallingsah yang telah dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- b) Candi Tebing Tegallingsah juga telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan telah tercatat dalam daftar inventaris Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dengan nomor 2/14-04/TB/2a sampai dengan 2/14-04/TB/2d.
- c) Telah terdapat villa dan homestay di kawasan Desa Adat Tegallingsah yang selain menyediakan fasilitas akomodasi juga melakukan aktivitas wisata lain seperti yoga, sehingga mobilitas wisatawan lebih tinggi.
- d) Masyarakat setempat banyak yang aktif berkesenian sehingga potensial untuk pengembangan pertunjukan seni.

- e) Masyarakat setempat juga cukup banyak yang bekerja di sektor pariwisata sehingga dianggap telah memiliki skill yang baik untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata.

C. Landasan Yuridis

Desa Adat di Bali semakin kuat posisinya dengan adanya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Selain itu, Desa Adat juga mengelola dana yang cukup banyak dimana dana tersebut digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu, tentunya dalam upaya terlaksananya program pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata Tangguh bencana berbasis digital, perlu didukung dengan perarem, dimana perarem itu sendiri harus sinkron dengan aturan yang dipedomani.

Adapun peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum secara substansi materi meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisatanan Nasional.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
- 6) Awig-Awig Desa Adat Tegallingah.
- 7) Perarem Desa Adat Tegallingah tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Wewidangan Desa Adat Tegallingah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Desa Adat dengan potensi alam, sosial budaya, dan adat istiadat yang dimilikinya terus dikembangkan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital.

Adapun arah jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah adalah adanya perencanaan untuk pengembangan desa adat sebagai desa wisata yang Tangguh dalam menghadapi bencana COVID-19 serta berbasis digital.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan *Perarem*

Bab I. Ketentuan Umum, yang berisi istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang dijadikan bahan untuk perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal, maksud dan tujuan pembentukan perarem.

Bab II. Maksud dan Tujuan, yang berisi maksud dan tujuan disusunnya perarem.

Bab III. Ruang Lingkup, yang berisi ruang lingkup yang diatur dalam perarem.

Bab IV. Perencanaan DEWATA, yang mengatur tentang proses perencanaan pengembangan dan tahap/roadmap program DEWATA.

Bab V. Kelembagaan DEWATA, yang mengatur tentang satuan tugas yang khusus menangani program DEWATA.

Bab VI. Peran Krama Desa Adat, yang mengatur tentang hak dan kewajiban krama Desa Adat terkait program DEWATA.

Bab VII. Kerjasama, yang mengatur tentang kewenangan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan program DEWATA.

Bab VIII. Pengelolaan Pendanaan, yang mengatur tentang pendapatan maupun pengeluaran terkait pelaksanaan program DEWATA.

Bab IX. Pembinaan dan Pengawasan, yang mengatur tentang pembinaan, pengawasan termasuk monev terkait program DEWATA.

Bab X. Ketentuan Penutup, yang memuat materi tentang pernyataan pemberlakuan perarem.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Desa Adat semakin maju karena Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali mulai memperhatikan dengan adanya regulasi yang kuat, pemberian dana Desa Adat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, sehingga pembangunan desa adat dalam berbagai aspek terus dipacu dan ditumbuhkembangkan, termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan.
- 2) Dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, desa adat memiliki peran yang sangat penting untuk mengakselerasi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan aktivitas era *new normal* di Bali.
- 3) Untuk menunjang pengembangan pembangunan di bidang kepariwisataan di desa adat, maka pemerintah daerah bersama-sama desa adat perlu berkreasi untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan desa wisata untuk desa yang memiliki potensi wisata yang menimbulkan daya tarik wisata, sehingga dapat membuka lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, memperkenalkan budaya yang ada di desa adat kepada para wisatawan yang datang.
- 4) Untuk mengembangkan Desa Adat Tegallinggah sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital ("DEWATA") maka perlu disusun dan ditetapkan regulasi yaitu Perarem sebagai dasar hukum untuk melaksanakan program DEWATA di Desa Adat Tegallinggah.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian dan penelitian untuk melihat potensi pariwisata di Desa Adat Tegallinggah yang mungkin dapat dikembangkan, baik wisata alam, wisata budaya, dan bila memungkinkan adalah wisata buatan.

- 2) Pemerintah daerah juga perlu memberikan pembinaan, pendidikan maupun pelatihan di bidang kepariwisataan, mitigasi bencana, dan literasi digital untuk akselerasi program DEWATA.
- 3) Sebagai dasar dan pedoman dalam perencanaan, pencanangan, dan implementasi program DEWATA, maka Desa Adat tegallinggah perlu dibentuk dan ditetapkan perarem.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Bali. 2021. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Februari 2021*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
- Hadiwijoyo, S.S. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pitana, I G. 2002. Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisata Bali. Denpasar, PT. The Works.
- Nirmala, B.P.W., Lavianto, S. 2019. Pemanfaatan Digital Enabler Dalam Transformasi Pemasaran Desa Wisata Berbasis Kerakyatan di Bali. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 5(1), 148-157.
- Santoso, S.P. 2002. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Kontribusi dalam Kolom Pakar Pinter. Available at: <http://www.kolom/pacific.net.id/ind>
- Sujali. 1989. Geografi Pariwisata dan Kepariwisata. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Yanti, A.A.I.E.K. 2019. Kewenangan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali Dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1), 48-61.

LAMPIRAN DRAFT PERAREM

DESA ADAT TEGALLINGGAH

KEPUTUSAN *PRAJURU* DESA ADAT DENPASAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
DESA WISATA TANGGUH BENCANA DESA ADAT TEGALLINGGAH

ATAS ASUNG *KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA*

PRAJURU DESA ADAT TEGALLINGGAH,

Menimbang : a bahwa dalam rangka perlindungan dan pengembangan potensi wisata desa adat yang tangguh bencana dapat mengakselerasi perekonomian dan pendapatan daerah serta kehidupan *Krama Bali* yang sejahtera dan bahagia secara *sekala-niskala* sehingga perlu dikelola secara inovatif, transparan, akuntabel dan professional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan *Perarem* Desa Wisata Tangguh Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Awig-Awig Desa Adat Tegallingga

Memperhatikan : Kesimpulan rapat *prajuru* Desa Adat Tegallingah bersama Sabha Kertha dan Kertha Desa Adat Tegallingah, pada hari....tanggal..bulan..tahun...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : *PERAREM* DESA WISATA TANGGUH BENCANA DESA ADAT TEGALLINGGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam *Perarem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adat adalah desa adat Tegallingah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*khayangan tiga* atau *khayangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota Desa Adat Tegallingah.
3. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik dan mempunyai ciri khas agar orang mau datang berkunjung ketempat tersebut.
4. Usaha wisata adalah segala bentuk kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau pengunjung dan mendapat keuntungan secara ekonomi.
5. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak – dampak bencana yang merugikan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Desa Wisata Tangguh Bencana adalah desa wisata yang berlatarbelakang desa adat yang melakukan usaha wisata dengan mengedepankan aspek penanggulangan bencana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan
- b. Kelembagaan Desa Wisata Digital Tangguh Bencana
- c. Peran *Krama* Adat
- d. Perencanaan Desa Wisata Digital Tangguh Bencana
- e. Pengelolaan Dana
- f. Pembinaan dan Pengawasan
- g. Kerjasama
- h. Ketentuan Penutup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Desa Wisata Digital Tangguh Bencana dibentuk dengan maksud untuk mengelola dan mengembangkan kawasan desa adat Tegallingah sebagai desa wisata berbasis digital serta menerapkan penyelenggaraan desa tangguh bencana serta seluruh prasarana dan sarana penunjang lainnya.
- (2) Tujuan Pengelolaan Desa Wisata Digital Tangguh Bencana Desa Adat Tegallingah adalah:
 - a. Meningkatkan perekonomian *krama* adat Desa Adat Tegallingah;
 - b. melestarikan, memajukan dan memuliakan budaya Bali yang sudah dikembangkan oleh *Krama* dan Adat Bali untuk dapat diperkenalkan secara luas kepada masyarakat Nasional maupun Internasional;
 - c. memajukan perekonomian *Krama* Bali yang mendedikasikan dirinya pada pelestarian pemajuan dan pemuliaan seni, olahraga, dan produk budaya lainnya dalam pengelolaan potensi desa adat berbasis digital; dan
 - d. perlindungan *krama* dan tempat wisata desa adat dari ancaman dan dampak bencana.

BAB III KELEMBAGAAN DESA WISATA DIGITAL TANGGUH BENCANA Bagian Kesatu Tanggung Jawab Desa Adat Pasal 4

- (1) Desa Adat bertanggung jawab dalam penataan lingkungan di wilayah lokasi wisata desa adat dengan/tanpa bantuan serta kerjasama pihak lain termasuk fasilitasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi serta memperhatikan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Adat
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan *krama* dari ancaman dan dampak bencana;

- b. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana;
- c. pemaduan atau pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan dan Rencana Kerja Desa Adat;
- d. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat sesuai dengan kemampuan keuangan desa adat;
- e. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan desa adat;
- f. fasilitasi pemeliharaan warisan budaya setempat baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- h. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Wewenang Desa Adat
Pasal 5

Desa Adat dalam penyelenggaraan desa wisata tangguh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang:

- a. menyusun perencanaan pembangunan dan Rencana Kerja Desa Adat yang memasukkan unsur-unsur kebijakan desa wisata dan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan desa wisata berbasis digital dan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan dan Rencana Kerja Desa Adat;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah/desa lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan desa wisata dan penanggulangan bencana;
- e. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan desa wisata dan penanggulangan bencana;
- f. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa wisata dan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Pengelola Usaha Wisata dan Atraksi Wisata
Pasal 6

- (1) Pengelola usaha wisata dan atraksi wisata di wilayah desa adat Tegallingah wajib memberikan kontribusi dan retribusi kepada desa adat yang besarnya berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (2) Pengelola usaha berhak mendapatkan informasi perkembangan pariwisata, konsultasi, perlindungan keamanan dan promosi kegiatan usaha dari desa adat.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN *KRAMA ADAT*
Bagian Kesatu
Hak *Krama Adat*
Pasal 7

- (1) Setiap *Krama* berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan desa wisata digital dan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan desa wisata digital dan penanggulangan bencana desa adat;
 - d. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan desa wisata digital dan penanggulangan bencana desa adat; dan
 - e. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan desa wisata digital dan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap *krama* yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 8

Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan desa wisata digital dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c paling kurang memuat:

- a. kebijakan penyelenggaraan desa wisata digital dan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. Risiko bencana;
- d. prediksi dan peringatan dini bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Bagian Kedua
Perlakuan Khusus
Pasal 10

- (1) *Krama* yang tergolong Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan

Bagian Ketiga
Kewajiban *Krama*
Pasal 11

Krama berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan desa wisata digital dan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang desa wisata digital dan penanggulangan bencana; dan
- d. Memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat
Peran *Krama*
Pasal 12

Krama memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan Desa wisata digital tangguh bencana.

Pasal 13

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam desa wisata digital dan penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

BAB VI
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA DESA WISATA DIGITAL TANGGUH
BENCANA
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan
Pasal 15

Sumber pendanaan penyelenggaraan Desa Wisata Digital Tangguh Bencana meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- b. bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan; dan
- c. sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

- (1) Desa Adat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat sebagaimana Pasal 15 secara memadai yang didasari sesuai jenis ancaman bencana dan kebutuhannya.
- (2) Rincian prioritas kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibahas melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa dan diusulkan dalam Rencana Kegiatan Program tahunan.

Pasal 17

- (1) Desa Adat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Adat dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana
Pasal 18

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Perarem ini.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Desa Adat, sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat melibatkan dan bekerjasama dengan, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sumber dana penanggulangan bencana berasal dari bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan maka penggunaannya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pemasukan dan penggunaan dana bantuan yang dilampiri dengan bukti transaksi.
- (3) Prosedur dan tata cara bantuan dana penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam hal sumber dana penanggulangan bencana berasal sumber dana yang sah dan tidak mengikat maka penggunaannya dilaksanakan dan pertanggungjawaban sesuai dengan administrasi yang dipersyaratkan oleh pemberi dana.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21

Desa Adat melakukan pembinaan dan pedoman dalam pengembangan desa Wisata digital dan tangguh bencana serta melakukan evaluasi secara berkala.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

- (1) Desa Adat melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan desa wisata dan tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. perencanaan penataan ruang; dan
- e. pengelolaan keuangan.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 23

- (1) Desa adat dalam pengelolaan desa wisata digital tangguh bencana dapat mengadakan kerjasama dengan desa adat lain, desa, dan/atau pihak lain.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat sesuai tingkatannya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis.
- (4) Kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Desa Adat sesuai tingkatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam *perarem* ini, sepanjang terkait dengan pengelolaan desa wisata tangguh bencana dapat diatur tersendiri berdasarkan keperluan dan kesepakatan *paruman* adat.

Pasal 25

- (1) Keputusan *prajuru* Desa Adat ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Agar *Krama* Adat lebih memahami keputusan ini, maka *prajuru* Desa Adat wajib melaksanakan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan desa adat, maka keputusan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegallingsah
pada tanggal.....

BENDESA ADAT TEGALLINGAH,

DRAFT

Dokumen pendukung luaran Tambahan #1

Luaran dijanjikan: Artikel di jurnal internasional

Target: Accepted

Dicapai: Accepted

Dokumen wajib diunggah:

1. Naskah artikel
2. Surat keterangan accepted dari editor

Dokumen sudah diunggah:

1. Naskah artikel
2. Surat keterangan accepted dari editor

Dokumen belum diunggah:

-

POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF CUSTOM VILLAGES INTO A DIGITAL-BASED TOURISM VILLAGE THAT CAN ADAPT TO THE NEW NORMAL ERA (CASE STUDY OF CUSTOM VILLAGES IN BALI, INDONESIA)

Putu Yudy WIJAYA^{1*}, Ni Nyoman Reni SUASIH^{2*}, I Putu Sastra WIBAWA^{1**},
Kadek Oki SANJAYA^{1***}, I Komang Tryana MERTAYASA^{2**}

¹Hindu Indonesia University, ^{*}Faculty of Economics Business and Tourism, ^{**}Faculty of Law, ^{***}Faculty of Information Technology and Science, Jl. Sangalangit, Denpasar, Bali, Indonesia, Phones/Faxes: 0361/464700, 0361/701954; E-mails: yudywijaya333@unhi.ac.id, sastra@unhi.ac.id, kadekoki@unhi.ac.id

²Udayana University, ^{*}Faculty of Economics and Business, ^{**}Faculty of Math and Natural Sciences ^{*}Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, ^{**}Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Bali, Indonesia, Phone/Fax: 0361/224133; Emails: renisuasih@unud.ac.id, tryana@gmail.com

Corresponding author: renisuasih@unud.ac.id

Abstract

The province of Bali, which relies on tourism as a driving force for the economy, is certainly very affected by the COVID-19 pandemic. The decline in foreign tourist arrivals to Bali has made the government and tourism actors begin to look at domestic tourists. Given the existence of tourism sector workers who return to the village, the development of tourist villages through the participation of local communities is very potential to be developed. The purpose of this research is to develop a policy framework for the development of custom villages as digital-based tourism villages that are able to adapt to the new normal era. This study used a MULTIPOL prospective analysis, where data were collected through FGDs. The policies analyzed are tourism village policies and digital villages, both in supply side and demand side scenarios. The results show that in the tourism village policy, the program arrangement of tourist objects/attractions is a priority. Meanwhile, in digital village policies, the development and improvement of information network programs are important.

Key words: tourism village, digital village, prospective analysis, multi policy

INTRODUCTION

To prevent the spread of the Corona virus, the government urges the public to carry out activities at home (stay at home), whether to work, study, or worship. The public is also advised to stay away from crowds and reduce travel, including traveling. This resulted in public places and tourist destinations being deserted and many not operating [14]. The same thing happened in Bali Province, where the mobility of people outside the home has decreased compared to conditions before the COVID-19 pandemic (Figure 1).

The province of Bali, which relies on tourism as a driving force for the economy, is certainly very affected by the COVID-19 pandemic. Workers in the tourism sector in Bali lost their jobs or changed professions, some decided to return to the village, so that

there was an increase in the growth of the number of workers in the agricultural, forestry and fisheries sectors.

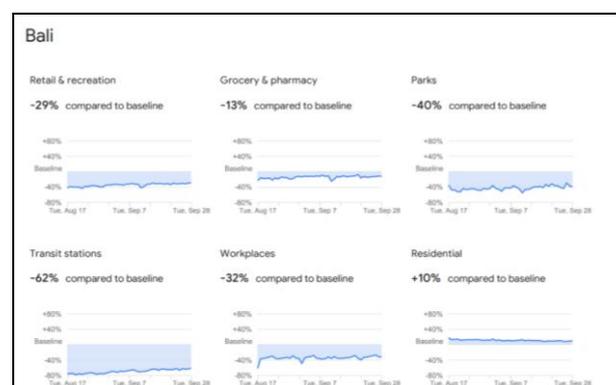


Fig. 1. Changes in Community Mobility in Bali Province (per 28 September 2021)

Source: Google Mobility Report (2021).

The decline in foreign tourist arrivals to Bali has made the government and tourism actors begin to look at domestic tourists. Given the existence of tourism sector workers who return to the village, the development of tourist villages through the participation of local communities is very potential to be developed. The village is a territory that is closely related to cultural similarities, as well as relatively easier control, so that the application of CHSE-based tourism (Cleanliness, Health, Safety, Environment) can be applied.

Tegallingsah Custom village is one of the custom villages in Bali that develops rural tourism, but already has adequate objects and supporting facilities. Such as the tourist attraction Tegallingsah Cliff Temple as known as *Candi Tebing Tegallingsah* (Figure 1). In addition, there are several villas and homestays (Photo 1 and 2) and a variety of innovative art attractions developed by the local community (Photo 3).



Photo 1. Tourist Attractions at Tegallingsah Custom Village

Source: Documentation of Tegallingsah Custom Village (2021).



Photo 2. Tourism Support Facilities at Tegallingsah Custom Village

Source: Own documentation (2021).



Photo 3. Art Attraction at Tegallingsah Custom Village
Source: Documentation of Tegallingsah Custom Village (2020).

The government considers Bali as the best area in handling COVID-19, because of the role of Custom villages [7], so that the development of digital-based tourism villages is expected to adapt to the new normal era. Moreover, Indonesia has sufficient capacity to implement the concept of a digital village [12]. So that the purpose of this research is to develop a policy framework for the development of custom villages as digital-based tourism villages that are able to adapt to the new normal era. The new normal era is an era where people are back to being productive and active because they have lived side by side with Covid-19 [9].

MATERIALS AND METHODS

Tourism Village Concept

A brief understanding of tourist villages is stated in the Minister of Culture and Tourism Regulation No. KM18/HM.001/MKP/2011 concerning Guidelines for the National Community Empowerment Program (PNPM) of Tourism Mandiri. Tourism village is an interaction between tradition and the dimensions of tourism (attractions, accommodation, and supporting facilities) in a structure of rural community life.

Tourism villages provide tourism with various local resources owned and managed [5]. In tourism villages, usually a small group of tourists can learn about village life and environment by living or close to traditional life in rural areas [6]. Each tourism village optimizes the potential of its village as a tourism attraction, so that existing resources

can grow and local communities get additional income [15]. Through the development of tourist villages, it will be able to support the economy of the local community through the growth of local entrepreneurs and see tourism products, as well as being able to simultaneously revitalize local culture [11].

Tourism Policy Analysis

The process of policy analysis is a series of intellectual activities carried out in the process of activities that are basically political in nature which are described as the policy-making process. In full, the process is visualized as a series of stages which include: agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy assessment [3].

In Indonesia, many tourism villages have been established, where these villages continue to make efforts to develop their tourism [10]. The government also supports these efforts by participating in formulating tourism development policies that are oriented towards making tourism a mainstay and leading sector. The government believes that tourism will be able to encourage economic growth and increase regional income, as well as a source of foreign exchange. In addition, tourism is believed to have a real impact on the welfare of the community, through the expansion of job opportunities and empowerment of the people's economy, of course without ignoring the issue of environmental sustainability and quality as well as maintaining the nation's personality [13].

Digital Village Concept

Digital village is a program concept that implements government service systems, community services, and community empowerment based on the use of information technology [1]. The development of digital villages is generally influenced by several factors. First, the education level of the community in the village, especially in terms of information technology. Second, access to information technology, and third is the seriousness of the government's efforts to introduce information technology to the public [16].

Research Methods

Policy analysis is a tool for synthesizing information to be used in formulating policy alternatives and preferences which are stated comparatively, predicted in quantitative and qualitative language as a basis or guide in making policy decisions [8]. The public policy analysis used in this study is a prospective policy analysis. Economists, systems analysts, and operations researchers conduct prospective policy analyzes based on the information obtained and then transformed before a policy can be started for implementation [3].

It was further explained that the prospective analysis technique to be used was MULTIPOL analysis. MULTIPOL in question are "MULTI-criteria" and "POLicy" with an integrated participatory approach. The three main elements in the MULTIPOL analysis are scenario, policy (policy direction), actions. Potential policy pathways that can be drawn up through MULTIPOL analysis. The data used in the MULTIPOL analysis comes from FGDs with stakeholders or experts who understand the research topic.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Determination of MULTIPOL Input Components

As explained in the research method, the MULTIPOL analysis technique is based on criteria, policies, and actions in various scenarios. Therefore, at the initial stage, the components are determined in advance.

The policies to be analyzed are tourism village policies and digital village policies. Furthermore, Table 1 also presents policy actions to realize tourism village policies and digital villages, including actions on disaster mitigation which are very important in the new normal era. The next input components are criteria and scenarios. For input scenarios, a supply side and demand side based rural development approach is used [4][2]. The supply side is more focused on investment in human resources, research and development, and capital formulation. While the demand side is emphasized on economic injection in

the form of transfer funds and public spending (Keynesian approach to rural development).

Table 1. Input Components of MULTIPOL Analysis on Development of Custom villages as Digital-Based Tourism Villages

No	Policy	Symbol	Weight
1	Tourism village	tour.vil	5
2	Digital village	digi.vil	4
No	Policy Action	Symbol	
1	Arrangement of tourist objects/attractions	tour.obj	
2	Development and strengthening of rural infrastructure	vil.infra	
3	Development and improvement of information network	ict	
4	Strengthening of rural community business unit (MSME)	msme	
5	Increasing community skills in tourism	tour.skill	
6	Empowerment of community groups	empowerment	
7	Increasing community knowledge in disaster mitigation	mitigation	
8	Increasing community's digital literacy	digi.liter	
No	Criteria	Symbol	
1	Increased income	income	5
2	Increased competitiveness	competitive	5
3	Absorption of workers/employment	employment	5
4	Growth of new business	business	5
5	Environmental sustainability	environment	5
6	Infrastructure improvement	infrastruc	4
7	Existence of events/tour packages	event	4
No	Scenario	Symbol	Weight
1	Supply Side	SS	5
2	Demand Side	DS	5

Source: Own elaborated (2021).

Results of MULTIPOL Analysis

Table 2 presents the results of the MULTIPOL analysis based on the scores for each policy and the mean scores, as well as the standard deviations obtained.

Table 2. Evaluation Based on Action and Policy on Development of Custom villages as Digital-Based Tourism Villages

Actions	Policy		Mean Value	Std. Deviation	Position
	Tourism Village	Tourism Digital			
tour.obj	13.2	12.3	12.8	0.5	8
vil.infra	12.5	12.2	12.4	0.2	5
ict	12.2	13.2	12.6	0.5	7
msme	11.7	12.2	11.9	0.3	4
tour.skill	12.7	12.5	12.6	0.1	6
empowerment	7.9	9.3	8.5	0.7	2
mitigation	6.5	6.6	6.6	0.1	1
digi.liter	11.8	12	11.9	0.1	3

Source: Output the results of data analysis with MULTIPOL (2021).

As shown in Table 2, the highest scores were obtained in the arrangement of tourist objects/attractions, development and improvement of information network, and increasing community skills in tourism. The program for increasing community knowledge in disaster mitigation is in the last position, where this is because disaster mitigation related to the COVID-19 pandemic is considered only as a support for tourism village activities and digital villages.

Furthermore, Figure 2 presents the results of the MULTIPOL profile map that links the scores for each action with the policy.

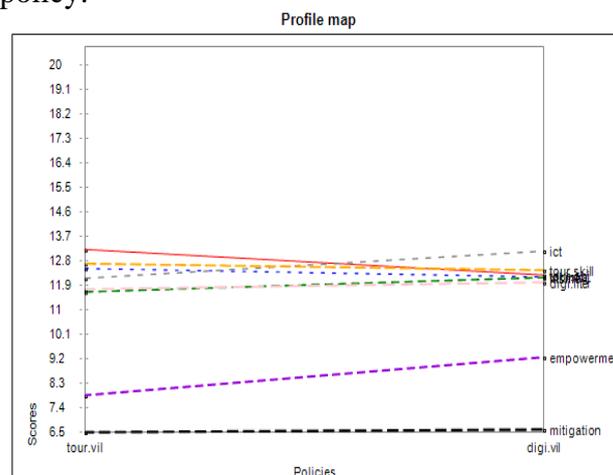


Fig. 2. Profile Map Between Actions and Policy Source: Output the results of data analysis with MULTIPOL (2021).

As shown in Figure 2, the arrangement of tourist objects/attractions program excels in the tourism village policy. So, it can be said that the priority program that should be implemented for tourism village policies is the arrangement of tourist objects, considering that tourist villages should have tourist attractions as icons. Meanwhile, the digital village policy shows that the development and improvement of information network program is a program with a higher score than other programs. This is natural because to realize a digital village, of course, it is necessary to develop and improve information networks (information, communication, and telecommunication).

Furthermore, Table 3 for each policy against a predetermined scenario, namely the supply side and the demand side.

In more detail, Figure 3 presents the position of each policy against the scenario as the results are presented in Table 3.

Table 3. Policy Score Against Scenario

Policies	Scenario		Mean Value	Std. Deviation	Position
	Supply Side	Demand Side			
Tourism village	14.4	13	13.7	0.7	1
Digital village	15.1	13.6	14.3	0.7	2

Source: Output the results of data analysis with MULTIPOL (2021).

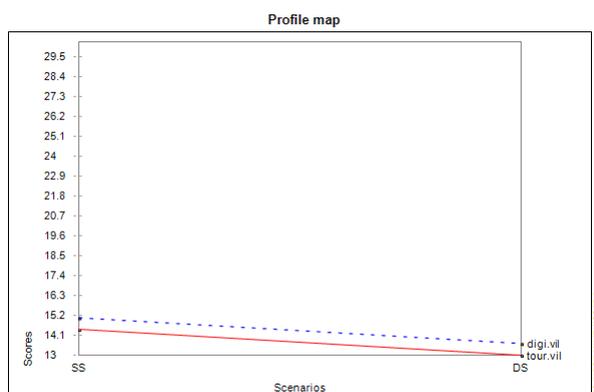


Fig. 3. Profile Map for Policy Against Scenarios

Source: Output the results of data analysis with MULTIPOL (2021).

Based on Table 3 and Figure 3, it is clear that the digital village policy excels in both supply side and demand side scenarios. This shows that digital village policies need to be considered as a priority for the sustainability of the development of Custom villages as digital-based tourism villages. However, the development of ICT is very rapid and has become one of the determinants of the success of the management, promotion, and implementation of tourist villages. MULTIPOL can be an alternative or complementary in sustainability analysis, especially those related to future analysis or foresight [4].

The overall results of the MULTIPOL analysis can be presented in the form of a potential policy path as shown in Figure 4.

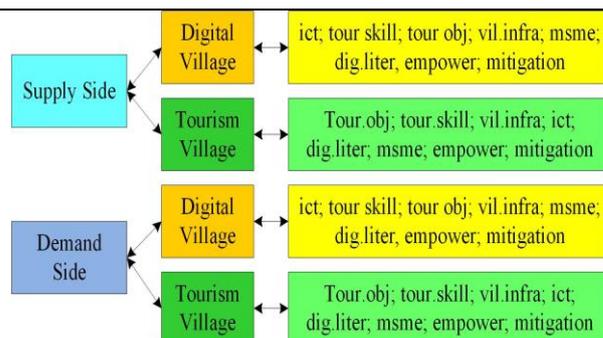


Fig. 4. Potential Policy Path

Source: Output the results of data analysis with MULTIPOL (2021) (elaborated).

Figure 4 presents the potential policy paths that can be taken through various actions that are in accordance with tourism village policies and digital villages, both in supply side and demand side scenarios. The role of the use of digital technology is allegedly going to be even greater in the new normal era, considering that people are accustomed to using ICT technology during restrictions during a pandemic. So, it is very natural that digital village policies will be further developed, including one of them being integrated with tourist villages.

CONCLUSIONS

In the development of custom villages into digital-based tourism villages that can adapt to the new normal era, the policies that can be carried out are tourism village policies and digital villages. In the tourism village policy, the program arrangement of tourist objects/attractions is a priority. Meanwhile, in digital village policies, development and improvement of information network programs are important. However, in the supply side and demand side scenarios, digital village policies become a priority. This is considering that in the new normal era, the use of ICT will be very large in various forms of community activities, including tourism. As a follow-up, the results of this study can be used as a policy reference and can be used as a basis for conducting further research on other policies in the development of tourist villages, especially in the case of custom villages in Bali.

ACKNOWLEDGEMENTS

This paper was supported by the project "IDEATHON Bali Kembali" co-funded from the National Agency for Disaster Management (BNPB) and Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, Contract no. 328/E4.1/AK.04.PT/2021 - 250A/KP.I/LPPM/UNHI/VI/2021.

REFERENCES

- [1]Alvaro, R., Octavia, E., 2019, Desa Digital: Potensi dan Tantangannya, Buletin APBN, IV(08), 8-11.
- [2]Deaton, B.J., Nelson, G.L., 1992, Conceptual Underpinnings of policy Analysis of Rural Development, Southern Journal of Agricultural Economics, 87-99.
- [3]Dunn, W.N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Second Edition, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [4]Fauzi, A., 2019, Teknik Analisis Keberlanjutan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [5]Herawati, A., Purwaningsih, A., Handharko, Y.D., 2018, PROMOTING Village Tourism Through the Development of Information Systems, Review of Integrative and Economics Research, 7 Supplementary Issue 1, 221-236.
- [6]Inskeep, E., 1991, Tourism Planning and Integrated and Sustainable Development Approach, New York: Van Non Strand Reinhold.
- [7]Mandira, M.C., Yudha, C.K., 2021, Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi COVID-19, Jurnal Publicuho, 4(1), 1-18. DOI: 10.35817/jpu.v4i1.15993, Accessed on March 23, 2021.
- [8]Mayasari, I., 2020, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, 9(1), 1-15. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>, Accessed on March 25, 2021.
- [9]Muhyiddin, 2020, Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, The Indonesian Journal of Development Planning, IV(2), 240-242.
- [10]Purnomo, S., Rahayu, E.S., Riani, A.L., Suminah, Udin, 2019, Empowerment Model for Sustainable Tourism Village in an Emerging Country, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(2), 261-270. doi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.261, Accessed on March 23, 2021.
- [11]Santhyasa, I K.G., 2016, Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Pengembangan Spasial Desa Wisata di Bali, Presented at the Seminar Nasional Agama, Adat, Seni dan Sejarah di Zaman Milenial.
- [12]Suyatna, R., 2019, Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Lingkar Widayaiswara, 06(1), 22-26.
- [13]Wardoyo, M.W., Bahtarudin, 2003, Tourism Development Policy (A Case of Tourism Village Policy in the Village of Ketenger, Subdistrict of Baturraden, Banyumas Regency), Jurnal Pembangunan Pedesaan, II(1), 39-47.
- [14]Wijaya, P.Y., Suasih, N.N.R., 2020, Peran Local Celebrity Endorsement pada Iklan di Media Sosial Terhadap Pembelian Produk Kuliner di Provinsi Bali pada Masa Stay Home Akibat Pandemi COVID-19, Jurnal Bisnis Strategi, 29(2), 119-133. <https://doi.org/10.14710/jbs.29.2.119-133>, Accessed on March 18, 2021.
- [15]Wijaya, P.Y., Hartati, P.S., Sumadi, N.K., 2020, The Readiness of Community Based Tourism Village Development (Case Study at Bongkasa Pertiwi Tourism Village, Bali Province, Indonesia), European Journal of Business and Management Research, 5(3), 1-5. <http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.3.269>, Accessed on March 18, 2021.
- [16]Wijaya, R. A. E., 2013, Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, 13(1),75-88.



Ni Nyoman Reni Suasih <renisuasih@unud.ac.id>

Acceptance of your paper for publication

1 pesan

agatha popescu <agatha_popescu@yahoo.com>
Kepada: "renisuasih@unud.ac.id" <renisuasih@unud.ac.id>

15 November 2021 02.11

**Dear Putu Yudy WIJAYA, Ni Nyoman Reni SUASIH, I Putu Sastra WIBAWA,
Kadek Oki SANJAYA, I Komang Tryana MERTAYASA,**

I am pleased to inform you that your paper:

**POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF CUSTOM VILLAGES INTO A DIGITAL-BASED TOURISM VILLAGE THAT
CAN ADAPT TO THE NEW NORMAL ERA (CASE STUDY OF CUSTOM VILLAGES IN BALI, INDONESIA)**

has been accepted to be published in the Journal "Scientific Papers Series Management,
Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol.21(4)2021 which will be
displayed by the end of the month of December 2021 on the web site:

<http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/current>.

Yours,

Prof. Dr. Agatha POPESCU

EXECUTIVE EDITOR

Dokumen pendukung luaran Tambahan #2

Luaran dijanjikan: Artikel pada Conference/Seminar Internasional

Target: Terbit dalam Prosiding

Dicapai: Accepted

Dokumen wajib diunggah:

1.

Dokumen sudah diunggah:

1. Naskah artikel

Dokumen belum diunggah:

-

Pengembangan Desa Adat di Bali Sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana (Studi Kasus pada Desa Adat Tegallingah, Gianyar)

¹Putu Yudy Wijaya
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar, Indonesia
yudywijaya333@unhi.ac.id

²Ni Nyoman Reni Suasih, ³I Putu Sastra Wibawa, ⁴Kadek Oki Sanjaya, ⁵I Komang Tryana Mertayasa

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
renisuasih@unud.ac.id

³Fakultas Hukum
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar, Indonesia
sastra@unhi.ac.id

⁴Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar, Indonesia
kadekoki@unhi.ac.id

⁵Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
tryanamertayasa@student.unud.ac.id

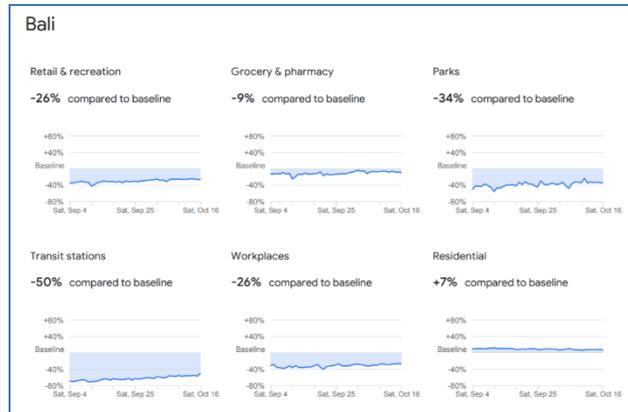
Abstrak— Perekonomian Provinsi Bali selama ini digerakkan oleh sektor pariwisata. Namun, *pandemic* COVID-19 mengakibatkan dampak luar biasa terhadap penurunan aktivitas pariwisata. Banyak tenaga kerja sektor pariwisata kembali ke desa akibat dirumahkan atau memutuskan beralih ke sektor lain. Tenaga kerja tersebut tentunya tak dapat serta merta beralih mengingat *skill* yang dimiliki adalah pada sektor pariwisata. Padahal pariwisata perdesaan sangat potensial dan menarik bagi wisatawan. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi bagi Desa Adat di Bali dalam penanganan COVID-19 yang berbasis desa adat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun *policy framework* dalam hal pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana yang mampu beradaptasi pada era *new normal*. Penelitian ini menggunakan analisis prospektif MULTIPOL, dimana data dikumpulkan melalui FGD. Kebijakan yang dianalisis adalah kebijakan desa wisata dan desa tangguh, baik pada skenario *supply side* maupun *demand side*. Hasilnya menunjukkan bahwa pada skenario *supply side*, kebijakan desa wisata menjadi lebih utama. Sedangkan pada skenario *demand side* lebih diutamakan kebijakan desa tangguh.

Kata Kunci— desa adat, desa wisata, desa tangguh bencana, *prospective analysis*, *multi policy*.

I. PENDAHULUAN

Sejak masa pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah (*stay at home*), baik bekerja, belajar, maupun beribadah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjauhi kerumunan serta

mengurangi bepergian, termasuk *travelling*. Hal itu mengakibatkan tempat-tempat umum maupun tempat tujuan wisata menjadi sepi dan banyak yang tidak beroperasi (Wijaya dan Suasih, 2020). Demikian pula yang terjadi di Provinsi Bali, dimana mobilitas masyarakat di luar rumah mengalami penurunan bila dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 (Gambar 1) dan berdampak terhadap kondisi perekonomian (Suasih *et al.*, 2021).



GAMBAR 1. FLUKTUASI MOBILITAS MASYARAKAT DI PROVINSI BALI (PER 16 OKTOBER 2021)
Sumber: Google Mobility Report (2021)

Sejarah pariwisata Bali mencatat bahwa *pandemic* COVID-19 adalah wabah penyakit yang paling berdampak dalam sejarah pariwisata Bali, serta mengakibatkan kunjungan wisatawan menurun drastis hingga 82,96% (Subadra, 2021). Efek domino penurunan kunjungan wisatawan tentu sudah sangat nyata, seperti penutupan bisnis-bisnis pariwisata di Bali yang selanjutnya berdampak pada ketenagakerjaan sektor pariwisata. Antara lain seperti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan *pandemic* COVID-19 berdampak pada pendapatan sekitar 1.285.000 orang (Thalib dan Meinarni, 2021).

Bagaimanapun juga, pariwisata merupakan motor penggerak perekonomian Bali sehingga pemerintah tetap berupaya melakukan pemulihan pariwisata Bali. Sejak Juli 2020, Pemerintah Provinsi Bali kembali membuka pariwisata Bali untuk wisatawan lokal Bali dan nusantara (Subadra, 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan pariwisata yang diminati wisatawan lokal dan nusantara namun tetap sesuai dengan tata aturan wisata *new normal*. Beberapa hasil kajian menemukan bahwa perlu dilakukan pengembangan pariwisata pedesaan untuk merespon perubahan minat wisatawan akan variasi tujuan wisata dan hiruk pikuk perkotaan (Susfenti, 2016).

Desa Adat Tegallinglah merupakan salah satu desa adat di Bali yang fokus untuk mengembangkan wisata pedesaan. Desa dengan segala sumber daya lokal yang dimiliki, dikelola dan disajikan kepada wisatawan disebut desa wisata (Herawati *et al.*, 2018). Berbagai potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui pariwisata (Wijaya *et al.*, 2020).

Saat ini Desa Adat Tegallinglah telah memiliki obyek wisata serta sarana penunjang wisata yang cukup memadai (villa maupun *homestay* dan ragam atraksi kesenian inovatif). Seperti adanya obyek wisata Candi Tebing Tegallinglah yang merupakan tinggalan arkeologi yang berada di kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) Pakerisan. Mengingat lokasinya serta kondisi *existing*, maka objek wisata ini memiliki keterancaman aus pada relief akibat rembesan air serta keterdapatannya longsor (Prayoga, 2019).

Selain fokus pada pengembangan desa wisata, Desa Adat Tegallinglah juga perlu dikembangkan sebagai desa tangguh bencana. Desa Tangguh bencana merupakan desa yang memiliki kapasitas untuk mengenali potensi bencana, mengurangi potensi bencana serta mampu mengorganisasi semua elemen dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kebencanaan (Julius *et al.*, 2020).

Selain sebagai upaya preventif terhadap kerawanan bencana, desa adat Tangguh bencana juga merupakan kebijakan penting untuk mengaktifkan kinerja Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat sebagaimana Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/660/PHA/DPMA-003/SKB/MDA-Prov.Bali/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong

Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Apalagi Pemerintah pusat menilai Bali sebagai daerah terbaik dalam penanganan COVID-19, karena peran Desa Adat (Mandira dan Yudha, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu *policy framework* pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana yang mampu beradaptasi pada era *new normal*, dengan studi kasus Desa Adat Tegallingah.

II. METODE

Analisis kebijakan dapat diartikan sebagai penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan (*formulation*) suatu masalah publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structures policy problem*) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*) yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*) (LAN, 2015).

Analisis kebijakan publik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kebijakan prospektif. Analisis kebijakan prospektif merupakan produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan, cenderung menunjukkan cara beroperasinya para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi (Dunn, 2003).

Adapun teknik analisis prospektif yang akan digunakan adalah analisis MULTIPOL. MULTIPOL yang dimaksud adalah “MULTI-*criteria*” dan “POL*icy*” dengan pendekatan *integrated participatory*. Tiga unsur utama pada analisis MULTIPOL yaitu *scenario*, *policy* (arah kebijakan), *actions*. Jalur potensial kebijakan yang dapat disusun melalui analisis MULTIPOL. Adapun data yang digunakan dalam analisis MULTIPOL berasal dari FGD bersama para *stakeholders* atau *expert* yang memahami topik penelitian (Fauzi, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Komponen Input MULTIPOL

Sebagaimana telah dijelaskan pada metode penelitian, bahwa teknik analisis MULTIPOL berbasis kriteria, *policy*, dan *action* pada berbagai skenario. Oleh karena itu pada tahap awal ditentukan terlebih dahulu komponen-komponen tersebut.

TABEL 1. KOMPONEN INPUT ANALISIS MULTIPOL TENTANG PENGEMBANGAN DESA ADAT SEBAGAI DESA WISATA BERBASIS DIGITAL

No	Kebijakan/Policy	Simbol	Bobot
1	Desa Wisata	tour.vil	5
2	Digital Tangguh	digi.vil	4
No	Program Kegiatan/Policy Action	Simbol	
1	Penataan obyek/atraksi wisata	obj.wst	
2	Pembangunan infrastruktur pedesaan	infra.desa	
3	Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	TIK	
4	Penguatan unit usaha (UMKM) pedesaan	UMKM	
5	Peningkatan kemampuan pelaku wisata pedesaan	skill.wst	
6	Pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan	pemberdayan	
7	Peningkatan kemampuan mitigasi bencana	mitigasi	
8	Peningkatan literasi <i>e-tourism</i> atau digitalisasi wisata	digi.wst	
No	Kriteria	Simbol	Bobot
1	Peningkatan pendapatan	pendapatan	5
2	Peningkatan daya saing	daya.saing	5
3	Penyerapan tenaga kerja	tng.kerja	5
4	Pertumbuhan unit usaha (UMKM) baru	usahabaru	5
5	Kelestarian lingkungan	lingkungan	5
6	Peningkatan infrastruktur	Infrastruk	4

No	Skenario	event.wst Simbol	4 Bobot
1	<i>Supply Side</i>	SS	5
2	<i>Demand Side</i>	DS	5

Dalam rangka pengembangan desa adat di Bali pada era *pandemic* COVID-19, maka kebijakan yang akan dianalisis adalah kebijakan desa wisata dan kebijakan desa tangguh bencana. Selanjutnya Tabel 1 juga menyajikan *policy action* yang terkait dengan kedua kebijakan tersebut, termasuk adalah *actions* tentang mitigasi bencana yang sangat penting dalam era *new normal*. Selain itu, juga program untuk pengembangan e-tourism atau digitalisasi sektor pariwisata sesuai dengan perkembangan zaman. Komponen input berikutnya adalah kriteria dan skenario. Untuk input skenario digunakan pendekatan pembangunan perdesaan berbasis *supply side* dan *demand side* (Fauzi, 2019; Deaton and Nelson, 1992). *Supply side* lebih difokuskan pada investasi sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta *capital formulation*. Sedangkan *demand side* ditekankan pada injeksi ekonomi berupa dana transfer maupun belanja *public* (pendekatan Keynesian dalam pembangunan pedesaan). Kriteria yang disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan, antara lain seperti peningkatan pendapatan, pertumbuhan unit usaha baru, peningkatan infrastruktur, hingga kelestarian lingkungan pedesaan.

B. Hasil Analisis MULTIPOL

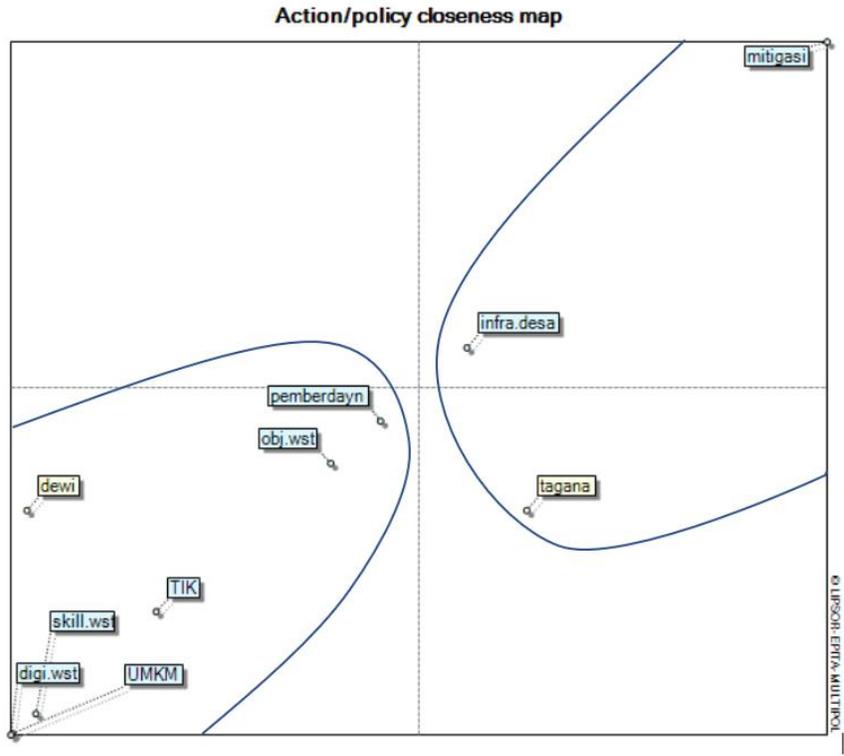
Tabel 2 menyajikan hasil analisis MULTIPOL berdasarkan skor untuk setiap kebijakan dan rerata skor, serta simpangan baku yang diperoleh.

TABEL 2. EVALUASI BERDASARKAN ACTION DAN POLICY DALAM PENGEMBANGAN DESA ADAT SEBAGAI DESA WISATA TANGGUH BENCANA

<i>Actions</i>	<i>Policy</i>		Nilai rerata (<i>mean value</i>)	Sim- pangan baku	Posisi
	Desa Wisata	Desa Tangguh Bencana			
Penataan obyek/atraksi wisata	13,2	13,8	13,5	0,3	7
Pembangunan infrastruktur pedesaan	12,5	15,1	13,7	1,2	8
Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	12,2	10,7	11,5	0,8	6
Penguatan unit usaha (UMKM) pedesaan	11,7	8,8	10,4	1,4	2
Peningkatan kemampuan pelaku wisata pedesaan	12,7	9,8	11,4	1,4	5
Pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan	10,2	11,3	10,7	0,5	4
Peningkatan kemampuan mitigasi bencana	6,5	11,4	8,7	2,5	1
Peningkatan literasi <i>e-tourism</i> atau digitalisasi wisata	11,8	8,9	10,5	1,4	3

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, skor tertinggi diperoleh pada pembangunan infrastruktur pedesaan, diikuti oleh penataan obyek/atraksi wisata, dan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Program pembangunan infrastruktur pedesaan berada pada posisi tertinggi, hal ini dikarenakan dalam hal optimalisasi pengembangan desa adat keberadaan infrastruktur merupakan hal utama yang harus dibenahi untuk kemajuan pedesaan. Program penataan objek/atraksi wisata unggul di kebijakan desa wisata. Sehingga dapat dikatakan bahwa program prioritas yang sebaiknya dilaksanakan untuk kebijakan desa wisata adalah penataan objek wisata, mengingat desa wisata sebaiknya memiliki atraksi wisata sebagai *icon*. Sementara pada kebijakan desa tangguh bencana terlihat bahwa program pengembangan infrastruktur pedesaan merupakan program dengan skor lebih tinggi dari program lainnya. Hal ini wajar karena untuk mewujudkan desa tangguh bencana, apalagi di daerah yang memiliki risiko bencana alam, maka infrastruktur terkait upaya pencegahan bencana memegang peran penting. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa objek wisata Candi Tebing Tegallingah termasuk rawan bencana longsor.

Gambar 1 menyajikan hasil MULTIPOL dalam bentuk *closeness map* yang merupakan peta kedekatan antara program (*actions*) dan kebijakan (*policy*). Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa program peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur pedesaan dekat dengan kebijakan desa Tangguh bencana. Sedangkan program lainnya cenderung lebih dekat dan berada satu kuadran dengan kebijakan desa wisata.



GAMBAR 1. KETERKAITAN *POLICY* DAN *ACTION* (*CLOSENESS MAP*)

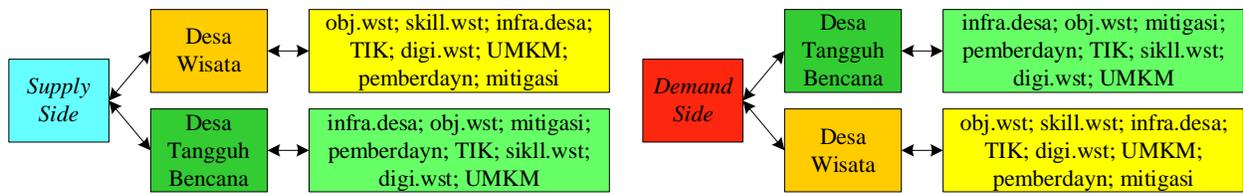
Selanjutnya Tabel 3 setiap *policy* terhadap skenario yang telah ditentukan, yaitu *supply side* dan *demand side*.

TABEL 3. SKOR KEBIJAKAN TERHADAP SKENARIO

<i>Policies</i>	<i>Scenario</i>		Nilai rerata (<i>mean value</i>)	Simpangan baku	Posisi
	<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>			
Desa Wisata	14,4	13	13,7	0,7	1
Desa Tangguh Bencana	13,2	17,2	15,2	2	2

Berdasarkan Tabel 3 terlihat jelas bahwa kebijakan desa Tangguh bencana unggul pada skenario *demand side*. Sedangkan pada skenario *supply side* kebijakan desa wisata lebih unggul. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa skenario *demand side* ditekankan pada injeksi ekonomi berupa dana transfer maupun belanja publik, sehingga sejalan dengan program unggul pada kebijakan desa Tangguh bencana, yaitu pengembangan infrastruktur pedesaan. Pada skenario *supply side*, fokus pada pengembangan SDM pedesaan, termasuk pemberdayaan masyarakat, sehingga kebijakan desa wisata yang lebih diunggulkan.

Keseluruhan hasil analisis MULTIPOL dapat disajikan dalam bentuk *potential policy path* (Gambar 2).



GAMBAR 2. POTENTIAL POLICY PATH

Gambar 2 menyajikan potensi jalur kebijakan yang dapat ditempuh melalui berbagai *actions* yang sesuai dengan kebijakan desa wisata maupun desa Tangguh bencana, baik pada skenario *supply side* maupun *demand side*. *Potential policy path* ini disusun berdasarkan nilai dan keunggulan masing-masing *actions*, pada tiap *policy* dan skenario.

IV. KESIMPULAN

Desa Adat Tegallinglah sangat potensial untuk dikembangkan sebagai desa wisata Tangguh bencana. Sehingga kebijakan yang telah dianalisis dalam penelitian ini adalah kebijakan desa wisata dan desa tangguh, baik pada skenario *supply side* maupun *demand side*. Hasilnya menunjukkan bahwa pada skenario *supply side*, kebijakan desa wisata menjadi lebih utama. Sedangkan pada skenario *demand side* lebih diutamakan kebijakan desa tangguh. Program penataan objek/atraksi wisata unggul di kebijakan desa wisata. Sementara pada kebijakan desa tangguh bencana terlihat bahwa program pengembangan infrastruktur pedesaan merupakan program dengan skor lebih tinggi dari program lainnya.

Sebagai tindak lanjut, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kebijakan, terutama terkait pengembangan desa wisata dan desa tangguh bencana berbasis desa adat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan penelitian lanjutan mengenai kebijakan lain dalam pengembangan desa wisata, khususnya pada kasus desa adat di Bali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan “IDEATHON Bali Kembali” yang didanai dan merupakan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kontrak No. 328/E4.1/AK.04.PT/2021 - 250A/KP.I/LPPM/UNHI/VI/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P.Y. Wijaya, N.N.R. Suasih, “Peran Local Celebrity Endorsement pada Iklan di Media Sosial Terhadap Pembelian Produk Kuliner di Provinsi Bali pada Masa *Stay Home* Akibat Pandemi COVID-19”. *Jurnal Bisnis Strategi*, vol. 29(2), 2020, pp. 119-133. <https://doi.org/10.14710/jbs.29.2.119-133>
- [2] N.N.R. Suasih, I.A.N. Saskara, P.Y. Wijaya, “Community Mobilities in Indonesia during the COVID-19 Pandemic and the Case of Bali. Eds. Resosumodarmo, B.P. et al., *Regional perspectives of COVID-19 in Indonesia (IRSA Book Series on Regional Development No.19)*.” Jakarta: IRSA Press, 2021.
- [3] I.N. Subadra, “Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali.” *Jurnal Kajian Bali*, vol. 11(01), 2021, pp. 1-22.
- [4] E.F. Thalib, N.P.S. Meinarni, “Implementasi perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pariwisata Bali atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Pandemi Covid-19.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 10(2), 2021. pp. 357-375. 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p12
- [5] N.E.M. Susfenti, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*) di Desa Sukajadi Kecamatan Carita”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 2(1), 2016. pp. 75-86.
- [6] A. Herawati, A. Purwaningsih, Y.D. Handharko, “PROMOTING Village Tourism Through the Development of Information Systems.” *Review of Integrative and Economics Research*, 7 Supplementary Issue 1, 2018, pp. 221-236.
- [7] P.Y. Wijaya, P.S. Hartati, N.K. Sumadi, “The Readiness of Community Based Tourism Village Development (Case Study at Bongkasa Pertiwi Tourism Village, Bali Province, Indonesia).” *European Journal of Business and Management Research*, vol. 5(3), 2020, pp. 1-5. <http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.3.269>
- [8] G. Prayoga, 2019. *Kajian Pengendalian Keterancaman Situs Candi Tebing Tegallinglah Desa Bedulu*. Retrieved from <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali/kajian-pengendalian-keterancaman-situs-candi-tebing-tegallinglah-desa-bedulu/>
- [9] A.M. Julius, N. Widyaningrum, A. Najib, A.A. Aminullah, H. Syarifah, H. Pratikno, I. Fadlurrahman, K. Adri, T. Suroso, R.M. Ramadhani, I D.K.K. Widana, ”Implementasi Program Desa Tangguh bencana di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor.” *Jurnal Swabumi*, vol. 8(1), 2020, pp. 1-10.
- [10] M.C. Mandira, C.K. Yudha, “Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi COVID-19.” *Jurnal Publicuho*, vol. 4(1), 2021, pp. 1-18. DOI: 10.35817/jpu.v4i1.15993



Ni Nyoman Reni Suasih <renisuasih@unud.ac.id>

Confirm Status of Abstract

Udayana Conference System <ucs@unud.ac.id>
Kepada: renisuasih@unud.ac.id

15 Oktober 2021 14.22



UDAYANA
CONFERENCE
SYSTEM

Hi Ni Nyoman Reni Suasih ,

Abstrak anda dengan judul : "PENGEMBANGAN DESA ADAT DI BALI SEBAGAI DESA WISATA TANGGUH BENCANA (STUDI KASUS PADA DESA ADAT TEGALLINGGAH, GIANYAR)" di **SENASTEK 2021** telah diterimapada proses validasi round 1. Silakan cek selengkapnya di <https://ucs.unud.ac.id>.

Terimakasih.

Your abstract is titled : "PENGEMBANGAN DESA ADAT DI BALI SEBAGAI DESA WISATA TANGGUH BENCANA (STUDI KASUS PADA DESA ADAT TEGALLINGGAH, GIANYAR)" at the **SENASTEK 2021** has been accepted on validation process round 1. Please check back at <https://ucs.unud.ac.id>.

Thank You.

CONTACT

Jl. Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung-Bali-803611

Phone Number: +62 (361) 701954, 704845

Fax: +62 (361) 701907

Email: info@unud.ac.id



Pengembangan Desa Adat di Bali Sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana (Studi Kasus pada Desa Adat Tegallingah, Gianyar)

¹Putu Yudy Wijaya
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar, Indonesia
yudywijaya333@unhi.ac.id

²Ni Nyoman Reni Suasih, ³I Putu Sastra Wibawa, ⁴Kadek Oki Sanjaya, ⁵I Komang Tryana Mertayasa

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
renisuasih@unud.ac.id

³Fakultas Hukum
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar, Indonesia
sastra@unhi.ac.id

⁴Fakultas Teknologi Informasi dan Sains
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar, Indonesia
kadekoki@unhi.ac.id

⁵Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
tryanamertayasa@student.unud.ac.id

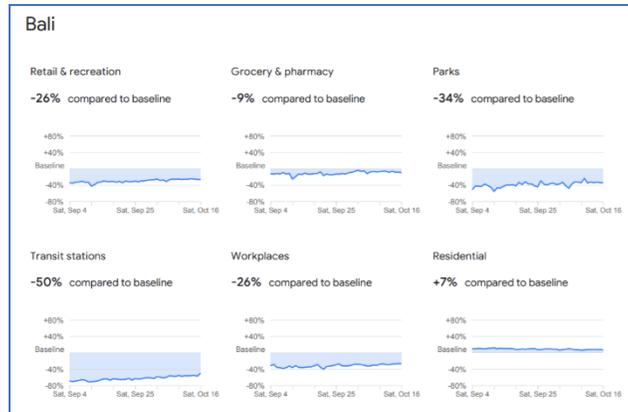
Abstrak— Perekonomian Provinsi Bali selama ini digerakkan oleh sektor pariwisata. Namun, *pandemic* COVID-19 mengakibatkan dampak luar biasa terhadap penurunan aktivitas pariwisata. Banyak tenaga kerja sektor pariwisata kembali ke desa akibat dirumahkan atau memutuskan beralih ke sektor lain. Tenaga kerja tersebut tentunya tak dapat serta merta beralih mengingat *skill* yang dimiliki adalah pada sektor pariwisata. Padahal pariwisata perdesaan sangat potensial dan menarik bagi wisatawan. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi bagi Desa Adat di Bali dalam penanganan COVID-19 yang berbasis desa adat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun *policy framework* dalam hal pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana yang mampu beradaptasi pada era *new normal*. Penelitian ini menggunakan analisis prospektif MULTIPOL, dimana data dikumpulkan melalui FGD. Kebijakan yang dianalisis adalah kebijakan desa wisata dan desa tangguh, baik pada skenario *supply side* maupun *demand side*. Hasilnya menunjukkan bahwa pada skenario *supply side*, kebijakan desa wisata menjadi lebih utama. Sedangkan pada skenario *demand side* lebih diutamakan kebijakan desa tangguh.

Kata Kunci— desa adat, desa wisata, desa tangguh bencana, *prospective analysis*, *multi policy*.

I. PENDAHULUAN

Sejak masa pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah (*stay at home*), baik bekerja, belajar, maupun beribadah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjauhi kerumunan serta

mengurangi bepergian, termasuk *travelling*. Hal itu mengakibatkan tempat-tempat umum maupun tempat tujuan wisata menjadi sepi dan banyak yang tidak beroperasi (Wijaya dan Suasih, 2020). Demikian pula yang terjadi di Provinsi Bali, dimana mobilitas masyarakat di luar rumah mengalami penurunan bila dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 (Gambar 1) dan berdampak terhadap kondisi perekonomian (Suasih *et al.*, 2021).



GAMBAR 1. FLUKTUASI MOBILITAS MASYARAKAT DI PROVINSI BALI (PER 16 OKTOBER 2021)
Sumber: Google Mobility Report (2021)

Sejarah pariwisata Bali mencatat bahwa *pandemic* COVID-19 adalah wabah penyakit yang paling berdampak dalam sejarah pariwisata Bali, serta mengakibatkan kunjungan wisatawan menurun drastis hingga 82,96% (Subadra, 2021). Efek domino penurunan kunjungan wisatawan tentu sudah sangat nyata, seperti penutupan bisnis-bisnis pariwisata di Bali yang selanjutnya berdampak pada ketenagakerjaan sektor pariwisata. Antara lain seperti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan *pandemic* COVID-19 berdampak pada pendapatan sekitar 1.285.000 orang (Thalib dan Meinarni, 2021).

Bagaimanapun juga, pariwisata merupakan motor penggerak perekonomian Bali sehingga pemerintah tetap berupaya melakukan pemulihan pariwisata Bali. Sejak Juli 2020, Pemerintah Provinsi Bali kembali membuka pariwisata Bali untuk wisatawan lokal Bali dan nusantara (Subadra, 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan pariwisata yang diminati wisatawan lokal dan nusantara namun tetap sesuai dengan tata aturan wisata *new normal*. Beberapa hasil kajian menemukan bahwa perlu dilakukan pengembangan pariwisata pedesaan untuk merespon perubahan minat wisatawan akan variasi tujuan wisata dan hiruk pikuk perkotaan (Susfenti, 2016).

Desa Adat Tegallinglah merupakan salah satu desa adat di Bali yang fokus untuk mengembangkan wisata pedesaan. Desa dengan segala sumber daya lokal yang dimiliki, dikelola dan disajikan kepada wisatawan disebut desa wisata (Herawati *et al.*, 2018). Berbagai potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui pariwisata (Wijaya *et al.*, 2020).

Saat ini Desa Adat Tegallinglah telah memiliki obyek wisata serta sarana penunjang wisata yang cukup memadai (villa maupun *homestay* dan ragam atraksi kesenian inovatif). Seperti adanya obyek wisata Candi Tebing Tegallinglah yang merupakan tinggalan arkeologi yang berada di kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) Pakerisan. Mengingat lokasinya serta kondisi *existing*, maka objek wisata ini memiliki keterancaman aus pada relief akibat rembesan air serta keterdapatannya longsor (Prayoga, 2019).

Selain fokus pada pengembangan desa wisata, Desa Adat Tegallinglah juga perlu dikembangkan sebagai desa tangguh bencana. Desa Tangguh bencana merupakan desa yang memiliki kapasitas untuk mengenali potensi bencana, mengurangi potensi bencana serta mampu mengorganisasi semua elemen dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kebencanaan (Julius *et al.*, 2020).

Selain sebagai upaya preventif terhadap kerawanan bencana, desa adat Tangguh bencana juga merupakan kebijakan penting untuk mengaktifkan kinerja Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat sebagaimana Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/660/PHA/DPMA-003/SKB/MDA-Prov.Bali/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong

Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Apalagi Pemerintah pusat menilai Bali sebagai daerah terbaik dalam penanganan COVID-19, karena peran Desa Adat (Mandira dan Yudha, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu *policy framework* pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana yang mampu beradaptasi pada era *new normal*, dengan studi kasus Desa Adat Tegallingah.

II. METODE

Analisis kebijakan dapat diartikan sebagai penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan (*formulation*) suatu masalah publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structures policy problem*) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*) yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*) (LAN, 2015).

Analisis kebijakan publik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kebijakan prospektif. Analisis kebijakan prospektif merupakan produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan, cenderung menunjukkan cara beroperasinya para ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi (Dunn, 2003).

Adapun teknik analisis prospektif yang akan digunakan adalah analisis MULTIPOL. MULTIPOL yang dimaksud adalah “MULTI-*criteria*” dan “POL*icy*” dengan pendekatan *integrated participatory*. Tiga unsur utama pada analisis MULTIPOL yaitu *scenario*, *policy* (arah kebijakan), *actions*. Jalur potensial kebijakan yang dapat disusun melalui analisis MULTIPOL. Adapun data yang digunakan dalam analisis MULTIPOL berasal dari FGD bersama para *stakeholders* atau *expert* yang memahami topik penelitian (Fauzi, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Komponen Input MULTIPOL

Sebagaimana telah dijelaskan pada metode penelitian, bahwa teknik analisis MULTIPOL berbasis kriteria, *policy*, dan *action* pada berbagai skenario. Oleh karena itu pada tahap awal ditentukan terlebih dahulu komponen-komponen tersebut.

TABEL 1. KOMPONEN INPUT ANALISIS MULTIPOL TENTANG PENGEMBANGAN DESA ADAT SEBAGAI DESA WISATA BERBASIS DIGITAL

No	Kebijakan/Policy	Simbol	Bobot
1	Desa Wisata	tour.vil	5
2	Digital Tangguh	digi.vil	4
No	Program Kegiatan/Policy Action	Simbol	
1	Penataan obyek/atraksi wisata	obj.wst	
2	Pembangunan infrastruktur pedesaan	infra.desa	
3	Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	TIK	
4	Penguatan unit usaha (UMKM) pedesaan	UMKM	
5	Peningkatan kemampuan pelaku wisata pedesaan	skill.wst	
6	Pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan	pemberdayan	
7	Peningkatan kemampuan mitigasi bencana	mitigasi	
8	Peningkatan literasi <i>e-tourism</i> atau digitalisasi wisata	digi.wst	
No	Kriteria	Simbol	Bobot
1	Peningkatan pendapatan	pendapatan	5
2	Peningkatan daya saing	daya.saing	5
3	Penyerapan tenaga kerja	tng.kerja	5
4	Pertumbuhan unit usaha (UMKM) baru	usahabaru	5
5	Kelestarian lingkungan	lingkungan	5
6	Peningkatan infrastruktur	Infrastruk	4

No	Skenario	event.wst Simbol	4 Bobot
1	<i>Supply Side</i>	SS	5
2	<i>Demand Side</i>	DS	5

Dalam rangka pengembangan desa adat di Bali pada era *pandemic* COVID-19, maka kebijakan yang akan dianalisis adalah kebijakan desa wisata dan kebijakan desa tangguh bencana. Selanjutnya Tabel 1 juga menyajikan *policy action* yang terkait dengan kedua kebijakan tersebut, termasuk adalah *actions* tentang mitigasi bencana yang sangat penting dalam era *new normal*. Selain itu, juga program untuk pengembangan e-tourism atau digitalisasi sektor pariwisata sesuai dengan perkembangan zaman. Komponen input berikutnya adalah kriteria dan skenario. Untuk input skenario digunakan pendekatan pembangunan perdesaan berbasis *supply side* dan *demand side* (Fauzi, 2019; Deaton and Nelson, 1992). *Supply side* lebih difokuskan pada investasi sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta *capital formulation*. Sedangkan *demand side* ditekankan pada injeksi ekonomi berupa dana transfer maupun belanja *public* (pendekatan Keynesian dalam pembangunan pedesaan). Kriteria yang disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan, antara lain seperti peningkatan pendapatan, pertumbuhan unit usaha baru, peningkatan infrastruktur, hingga kelestarian lingkungan pedesaan.

B. Hasil Analisis MULTIPOL

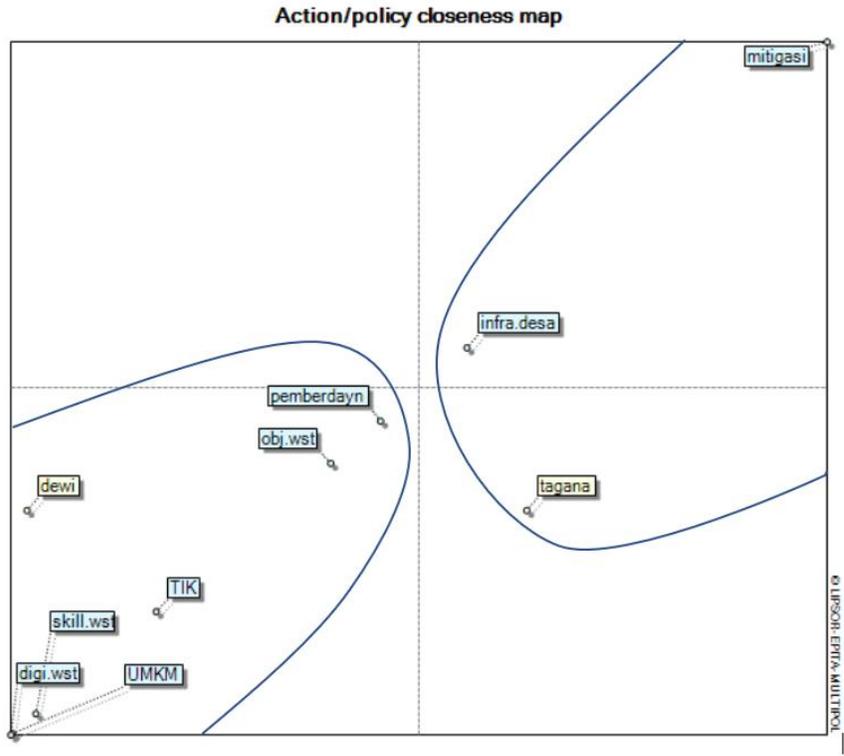
Tabel 2 menyajikan hasil analisis MULTIPOL berdasarkan skor untuk setiap kebijakan dan rerata skor, serta simpangan baku yang diperoleh.

TABEL 2. EVALUASI BERDASARKAN ACTION DAN POLICY DALAM PENGEMBANGAN DESA ADAT SEBAGAI DESA WISATA TANGGUH BENCANA

<i>Actions</i>	<i>Policy</i>		Nilai rerata (<i>mean value</i>)	Sim- pangan baku	Posisi
	Desa Wisata	Desa Tangguh Bencana			
Penataan obyek/atraksi wisata	13,2	13,8	13,5	0,3	7
Pembangunan infrastruktur pedesaan	12,5	15,1	13,7	1,2	8
Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	12,2	10,7	11,5	0,8	6
Penguatan unit usaha (UMKM) pedesaan	11,7	8,8	10,4	1,4	2
Peningkatan kemampuan pelaku wisata pedesaan	12,7	9,8	11,4	1,4	5
Pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan	10,2	11,3	10,7	0,5	4
Peningkatan kemampuan mitigasi bencana	6,5	11,4	8,7	2,5	1
Peningkatan literasi <i>e-tourism</i> atau digitalisasi wisata	11,8	8,9	10,5	1,4	3

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, skor tertinggi diperoleh pada pembangunan infrastruktur pedesaan, diikuti oleh penataan obyek/atraksi wisata, dan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Program pembangunan infrastruktur pedesaan berada pada posisi tertinggi, hal ini dikarenakan dalam hal optimalisasi pengembangan desa adat keberadaan infrastruktur merupakan hal utama yang harus dibenahi untuk kemajuan pedesaan. Program penataan objek/atraksi wisata unggul di kebijakan desa wisata. Sehingga dapat dikatakan bahwa program prioritas yang sebaiknya dilaksanakan untuk kebijakan desa wisata adalah penataan objek wisata, mengingat desa wisata sebaiknya memiliki atraksi wisata sebagai *icon*. Sementara pada kebijakan desa tangguh bencana terlihat bahwa program pengembangan infrastruktur pedesaan merupakan program dengan skor lebih tinggi dari program lainnya. Hal ini wajar karena untuk mewujudkan desa tangguh bencana, apalagi di daerah yang memiliki risiko bencana alam, maka infrastruktur terkait upaya pencegahan bencana memegang peran penting. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa objek wisata Candi Tebing Tegallingah termasuk rawan bencana longsor.

Gambar 1 menyajikan hasil MULTIPOL dalam bentuk *closeness map* yang merupakan peta kedekatan antara program (*actions*) dan kebijakan (*policy*). Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa program peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur pedesaan dekat dengan kebijakan desa Tangguh bencana. Sedangkan program lainnya cenderung lebih dekat dan berada satu kuadran dengan kebijakan desa wisata.



GAMBAR 1. KETERKAITAN *POLICY* DAN *ACTION* (*CLOSENESS MAP*)

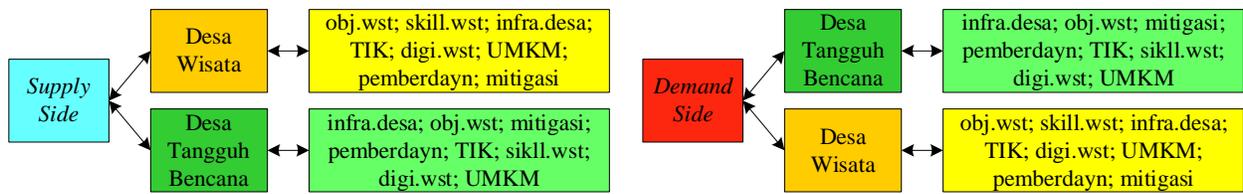
Selanjutnya Tabel 3 setiap *policy* terhadap skenario yang telah ditentukan, yaitu *supply side* dan *demand side*.

TABEL 3. SKOR KEBIJAKAN TERHADAP SKENARIO

<i>Policies</i>	<i>Scenario</i>		Nilai rerata (<i>mean value</i>)	Simpangan baku	Posisi
	<i>Supply Side</i>	<i>Demand Side</i>			
Desa Wisata	14,4	13	13,7	0,7	1
Desa Tangguh Bencana	13,2	17,2	15,2	2	2

Berdasarkan Tabel 3 terlihat jelas bahwa kebijakan desa Tangguh bencana unggul pada skenario *demand side*. Sedangkan pada skenario *supply side* kebijakan desa wisata lebih unggul. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa skenario *demand side* ditekankan pada injeksi ekonomi berupa dana transfer maupun belanja publik, sehingga sejalan dengan program unggul pada kebijakan desa Tangguh bencana, yaitu pengembangan infrastruktur pedesaan. Pada skenario *supply side*, fokus pada pengembangan SDM pedesaan, termasuk pemberdayaan masyarakat, sehingga kebijakan desa wisata yang lebih diunggulkan.

Keseluruhan hasil analisis MULTIPOL dapat disajikan dalam bentuk *potential policy path* (Gambar 2).



GAMBAR 2. POTENTIAL POLICY PATH

Gambar 2 menyajikan potensi jalur kebijakan yang dapat ditempuh melalui berbagai *actions* yang sesuai dengan kebijakan desa wisata maupun desa Tangguh bencana, baik pada skenario *supply side* maupun *demand side*. *Potential policy path* ini disusun berdasarkan nilai dan keunggulan masing-masing *actions*, pada tiap *policy* dan skenario.

IV. KESIMPULAN

Desa Adat Tegallinglah sangat potensial untuk dikembangkan sebagai desa wisata Tangguh bencana. Sehingga kebijakan yang telah dianalisis dalam penelitian ini adalah kebijakan desa wisata dan desa tangguh, baik pada skenario *supply side* maupun *demand side*. Hasilnya menunjukkan bahwa pada skenario *supply side*, kebijakan desa wisata menjadi lebih utama. Sedangkan pada skenario *demand side* lebih diutamakan kebijakan desa tangguh. Program penataan objek/atraksi wisata unggul di kebijakan desa wisata. Sementara pada kebijakan desa tangguh bencana terlihat bahwa program pengembangan infrastruktur pedesaan merupakan program dengan skor lebih tinggi dari program lainnya.

Sebagai tindak lanjut, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kebijakan, terutama terkait pengembangan desa wisata dan desa tangguh bencana berbasis desa adat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan penelitian lanjutan mengenai kebijakan lain dalam pengembangan desa wisata, khususnya pada kasus desa adat di Bali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan “IDEATHON Bali Kembali” yang didanai dan merupakan kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kontrak No. 328/E4.1/AK.04.PT/2021 - 250A/KP.I/LPPM/UNHI/VI/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P.Y. Wijaya, N.N.R. Suasih, “Peran Local Celebrity Endorsement pada Iklan di Media Sosial Terhadap Pembelian Produk Kuliner di Provinsi Bali pada Masa *Stay Home* Akibat Pandemi COVID-19”. *Jurnal Bisnis Strategi*, vol. 29(2), 2020, pp. 119-133. <https://doi.org/10.14710/jbs.29.2.119-133>
- [2] N.N.R. Suasih, I.A.N. Saskara, P.Y. Wijaya, “Community Mobilities in Indonesia during the COVID-19 Pandemic and the Case of Bali. Eds. Resosumodarmo, B.P. et al., *Regional perspectives of COVID-19 in Indonesia (IRSA Book Series on Regional Development No.19)*.” Jakarta: IRSA Press, 2021.
- [3] I.N. Subadra, “Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat Bali.” *Jurnal Kajian Bali*, vol. 11(01), 2021, pp. 1-22.
- [4] E.F. Thalib, N.P.S. Meinarni, “Implementasi perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pariwisata Bali atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Pandemi Covid-19.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 10(2), 2021. pp. 357-375. 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p12
- [5] N.E.M. Susfenti, “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*) di Desa Sukajadi Kecamatan Carita”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 2(1), 2016. pp. 75-86.
- [6] A. Herawati, A. Purwaningsih, Y.D. Handharko, “PROMOTING Village Tourism Through the Development of Information Systems.” *Review of Integrative and Economics Research*, 7 Supplementary Issue 1, 2018, pp. 221-236.
- [7] P.Y. Wijaya, P.S. Hartati, N.K. Sumadi, “The Readiness of Community Based Tourism Village Development (Case Study at Bongkasa Pertiwi Tourism Village, Bali Province, Indonesia).” *European Journal of Business and Management Research*, vol. 5(3), 2020, pp. 1-5. <http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.3.269>
- [8] G. Prayoga, 2019. *Kajian Pengendalian Keterancaman Situs Candi Tebing Tegallinglah Desa Bedulu*. Retrieved from <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali/kajian-pengendalian-keterancaman-situs-candi-tebing-tegallinglah-desa-bedulu/>
- [9] A.M. Julius, N. Widyaningrum, A. Najib, A.A. Aminullah, H. Syarifah, H. Pratikno, I. Fadlurrahman, K. Adri, T. Suroso, R.M. Ramadhani, I D.K.K. Widana, ”Implementasi Program Desa Tangguh bencana di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor.” *Jurnal Swabumi*, vol. 8(1), 2020, pp. 1-10.
- [10] M.C. Mandira, C.K. Yudha, “Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi COVID-19.” *Jurnal Publicuho*, vol. 4(1), 2021, pp. 1-18. DOI: 10.35817/jpu.v4i1.15993